

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tersusun. Rencana Strategis pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tersebut merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Dokumen Renstra tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2012-2017 dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta memuat beberapa tuntutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Strategis, dan Kebijakan Pembangunan BAPPEDA DIY, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja BAPPEDA DIY yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD DIY, serta Penutup. Lebih lanjut Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun yang di turunkan kemudian didalam Rencana Kerja (Renja).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga ke depan dokumen Renstra BAPPEDA DIY yang sudah tersusun tersebut dapat menjadi landasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 5 Juni 2013

Kepala BAPPEDA DIY



TAVIP AGUS RAYANTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Kerangka Pikir Penyusunan Rencana Strategis.....	4
E. Sistematika Penyusunan.....	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	9
A. Tugas, Fungsi, Dan Struktur BAPPEDA.....	9
B. Sumberdaya BAPPEDA DIY.....	14
1. Kondisi Kepegawaian.....	14
2. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	16
C. Kinerja Pelayanan BAPPEDA DIY.....	17
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA DIY.....	20
BAB III. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	23
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda DIY.....	23
B. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	24
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA DIY.....	27
2. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BAPPEDA DIY.....	28
C. Telaahan Renstra Bappenas Dan Renstra Bappeda Kabupaten/Kota.....	30
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	43
E. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	44

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BAPPEDA DIY49

- A. Visi dan Misi 49
- B. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah 51
 - 1. Tujuan 51
 - 2. Sasaran..... 51
- C. Strategi Dan Kebijakan..... 54
 - 1. Analisis Lingkungan Strategis..... 54
 - 2. Perumusan dan Penetapan Strategi..... 55

BAB V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kerja, dan Pendanaan Indikatif.....61

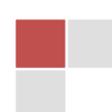
- A. Rencana Program/Kegiatan..... 61
- B. Indikator Kinerja dan Pendanaan..... 65

BAB. VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA DIY YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DIY 71

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran..... 71
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur..... 73
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 74
- 4. Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan..... 75
- 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 76
- 6. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan..... 78
- 7. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian 79
- 8. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 80
- 9. Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana..... 81
- 10. Program Pengendalian Pembangunan Daerah..... 83
- 11. Program Pengembangan Data/Informasi 85
- 12. Program Pengembangan Statistik Daerah 86

BAB VII. PENUTUP89

- A. Kesimpulan 89
- B. Rekomendasi 90



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di BAPPEDA DIY Tahun 2013	14
Tabel II.2	Kondisi Kepegawaian Pada BAPPEDA DIY Menurut Golongan Tahun 2013	15
Tabel II.3	Kondisi Kepegawaian Pada BAPPEDA DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013	15
Tabel II.4	Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada BAPPEDA DIY Tahun 2013	16
Tabel II.5	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA DIY Tahun 2009-2013	17
Tabel II.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA DIY	19
Tabel II.7	Lanjutan, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA DIY	19
Tabel III.1	Kaitan Visi, Misi KDH dan Wakil KDH dengan Tugas Fungsi Pelayanan BAPPEDA	24
Tabel III.2	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJM Terkait dengan Pelayanan BAPPEDA	26
Tabel III.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BAPPEDA Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28
Tabel III.4	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	30
Tabel III.5	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY Berdasarkan Sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten/Kota di DIY Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	32
Tabel III.6	Telaahan RTRW dan KLHS Terkait Pelayanan BAPPEDA DIY	44
Tabel IV.1	Tujuan yang Ditetapkan untuk Mencapai Visi dan Misi	51
Tabel IV.2	Sasaran yang Ditempuh Untuk Mencapai Tujuan	52
Tabel IV.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD BAPPEDA DIY	53
Tabel IV.4	Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal	54
Tabel IV.5	Formulasi Strategi SWOT	56

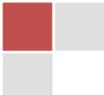
Tabel IV.6	Strategi yang Ditetapkan Dalam Rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran Melalui Kebijakan dan Program.....	58
Tabel V.1	Program dan Kegiatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013.....	62
Tabel V.2	Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Tiap Program Prioritas Pembangunan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017.....	66
Tabel V.3	Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Program Keistimewaan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017	69
Tabel VI.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	71
Tabel VI.2	Indikator Kinerja SKPD Urusan Keistimewaan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Kerangka Pikir Penyusunan Renstra SKPD..... 5

Gambar I.2 Keterkaitan Renstra SKPD dan SPM..... 6

Gambar II.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta..... 10



BAB I

Pendahuluan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis SKPD yang dalam hal ini disusun adalah Rencana Strategis BAPPEDA DIY akan mencakup substansi yang mendasar terkait dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang berpedoman pada RPJMD DIY dan bersifat indikatif. Didalam BAB I Penyusunan Renstra BAPPEDA DIY sesuai dengan substansi yang disampaikan ke depan akan diuraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, kerangka pikir penyusunan Renstra, serta sistematika penyusunan laporan.

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang terintegrasi dan komprehensif dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Kinerja perencanaan pembangunan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi pembangunan. Pembangunan akan berhasil sebagian besar didukung oleh perencanaan yang berkualitas. Perencanaan yang berkualitas hanya dihasilkan oleh lembaga perencanaan yang berkapasitas handal dalam bidangnya. Oleh karena itu, BAPPEDA DIY yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi BAPPEDA, diarahkan untuk menjawab tantangan arah pembangunan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana terkandung dalam RPJPD DIY 2005-2025 dan RPJMD 2012-2017, serta amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, menuntut BAPPEDA DIY sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kinerjanya secara solid dan profesional dalam perumusan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang strategis dan bertahap.

Perubahan lingkungan yang dinamis baik lingkungan strategis di tingkat lokal, regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini membutuhkan antisipasi melalui perencanaan strategis. Isu-isu strategis yang muncul dalam kancah internasional maupun nasional antara lain: pembangunan yang pro poor, pro job, pro environment; pengarusutamaan gender, pendidikan untuk semuanya, dan

sebagainya akan mempengaruhi dokumen-dokumen perencanaan di daerah. Penyusunan Renstra BAPPEDA DIY Tahun 2012 – 2017 ini selain mempertimbangkan aspek eksternal tersebut juga mengakomodir kebutuhan instansional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renstra BAPPEDA DIY merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2012-2017 dan bersifat indikatif.

Renstra BAPPEDA DIY disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJMD DIY 2012-2017 dan mempertimbangkan kondisi internal-maupun eksternal yang mempengaruhi fungsi pelayanan BAPPEDA DIY. Pertimbangan dan masukan dari pelbagai elemen/pihak/masyarakat juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses penyusunan renstra, termasuk menerjemahkannya menjadi bagian isu strategis. Lebih dari itu, keberadaan Renstra BAPPEDA DIY juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Bappenas/KL, Renstra Bappeda Kab/kota, dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

Banyaknya pertimbangan yang menjadi dasar isu strategis tersebut kemudian dirumuskan menjadi visi-misi BAPPEDA DIY selama kurun lima tahun mendatang yang diturunkan menjadi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program/kegiatan. Desain tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi dan dinamika masyarakat serta kebijakan yang mempengaruhi arah perencanaan BAPPEDA DIY selama lima tahun kedepan. Terkait dengan hal tersebut, penyusunan Renstra BAPPEDA DIY 2012-2017 diharapkan mampu mempercepat pencapaian visi-misi Gubernur DIY yang sudah termuat dalam dokumen RPJMD 2012-2017. Selanjutnya, pasca penyusunan Renstra dapat segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Renja (Rencana Kerja) dalam mempercepat pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA DIY Tahun 2012-2017.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012 – 2017;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

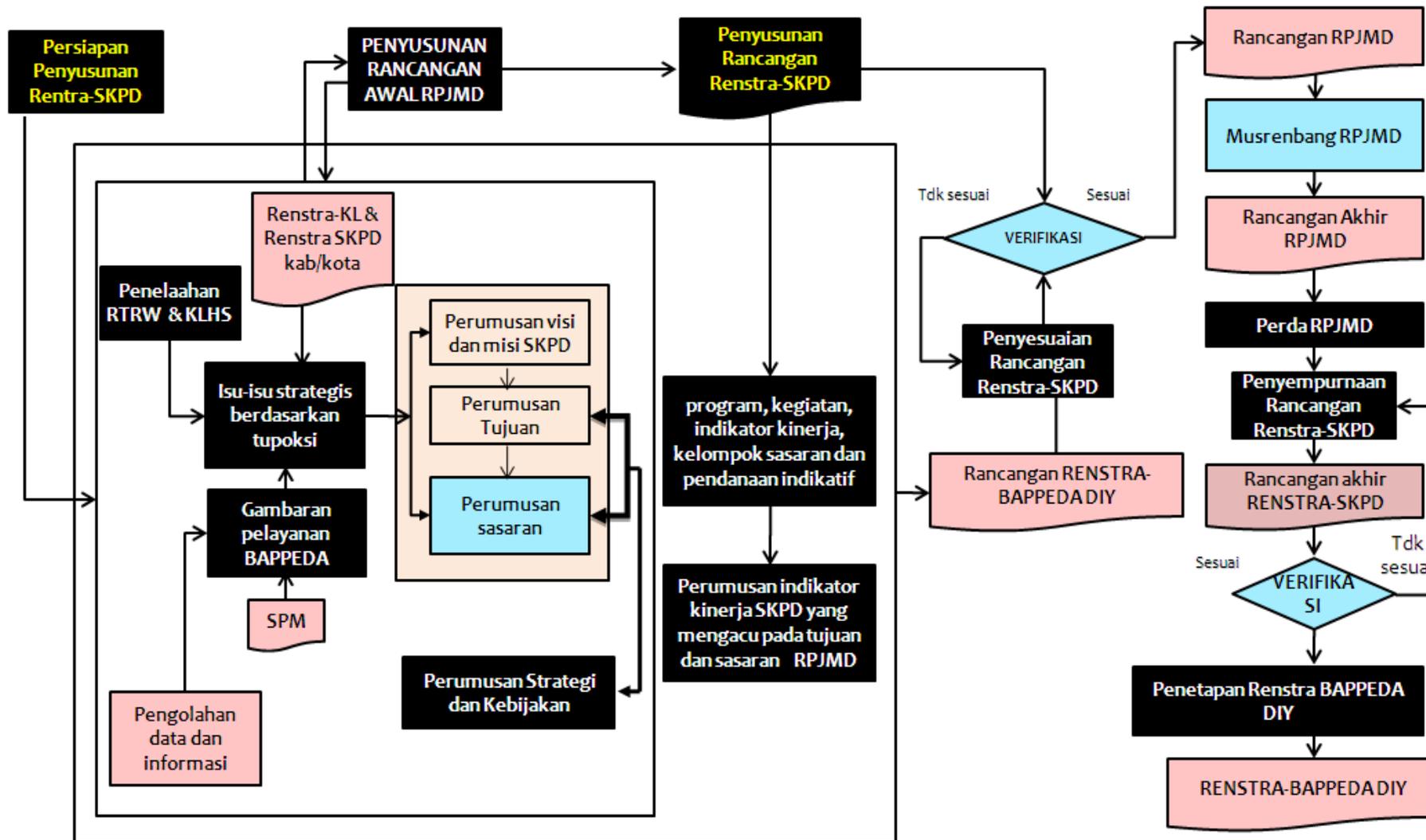
Maksud penyusunan Renstra 2012 – 2017 BAPPEDA DIY adalah memberi arah dan pedoman bagi BAPPEDA DIY dalam penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan BAPPEDA DIY dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Tahun 2012-2017;
2. Menetapkan Program dan Kegiatan BAPPEDA DIY yang akan dilakukan serta target kinerja dalam kurun waktu 2012-2017;
3. Sebagai pedoman penyusunan Renja BAPPEDA DIY kurun waktu 2012-2017.

D. Kerangka Pikir Penyusunan Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis SKPD, dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan ketentuan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dimulai dari tahap persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan Rencana Strategis tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan RPJMD. Dalam hal ini renstra SKPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan untuk masa perencanaan selama 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan produk RPJMD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya yang pada Tahun 2012 disusun seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara lebih jelasnya diagram alir proses penyusunan renstra sampai dengan proses ditetapkannya renstra dapat dilihat pada gambar berikut ini.

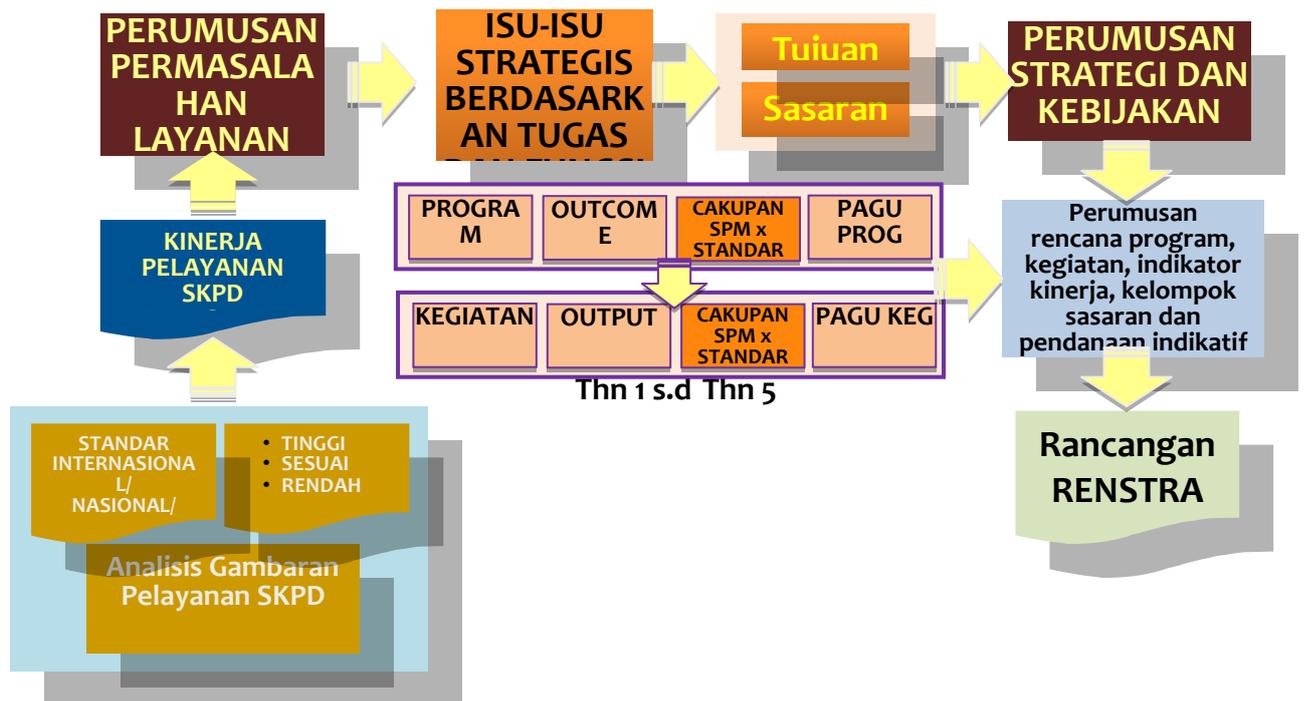


Gambar I.1 Kerangka Pikir Penyusunan Renstra SKPD



Lebih dari itu di dalam konsep pendekatan perencanaan di daerah maupun nasional telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun sebagai salah satu bagian dari unsur penilaian kinerja SKPD didalam implementasi kegiatan pembangunan. Didalam proses penyusunan Rencana Strategis SKPD, maka komponen Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi salah satu hal yang sangat penting, sehingga SPM menjadi salah satu dokumen yang memberikan input didalam perumusan konsep kebijakan maupun indikator turunan didalam penyusunan renstra SKPD. Secara lebih jelasnya diagram keterkaitan antara SPM dengan dokumen Renstra dapat dilihat pada gambar berikut ini.

z



Gambar I.2 Keterkaitan Renstra SKPD dan SPM

E. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Renstra BAPPEDA DIY periode 2012 – 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DIY

Pada bab ini berisi mengenai peran (tugas dan fungsi) BAPPEDA DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki BAPPEDA DIY dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

Renstra BAPPEDA DIY periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas BAPPEDA DIY yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pada bab ini berisi mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BAPPEDA DIY, telaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota, telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuamn isu-isu strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi mengenai visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta, serta strategi dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini berisi mengenai rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dari tiap program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini berisi mengenai indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran/rekomendasi dari laporan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

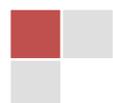
Gambaran Pelayanan SKPD

Gambaran Pelayanan SKPD dalam hal ini adalah BAPPEDA DIY dalam konteks penyusunan Rencana Strategis diperlukan didalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang dalam hal ini adalah terkait dengan kelembagaan dari BAPPEDA DIY, sumberdaya yang dimiliki oleh BAPPEDA DIY yang terkait dengan kondisi kepegawaian, serta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAPPEDA DIY, kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA DIY yang tentunya terkait dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA DIY, serta tantangan dan peluang didalam usaha untuk mengembangkan pelayanan BAPPEDA DIY.

A. Tugas, Fungsi, Dan Struktur BAPPEDA

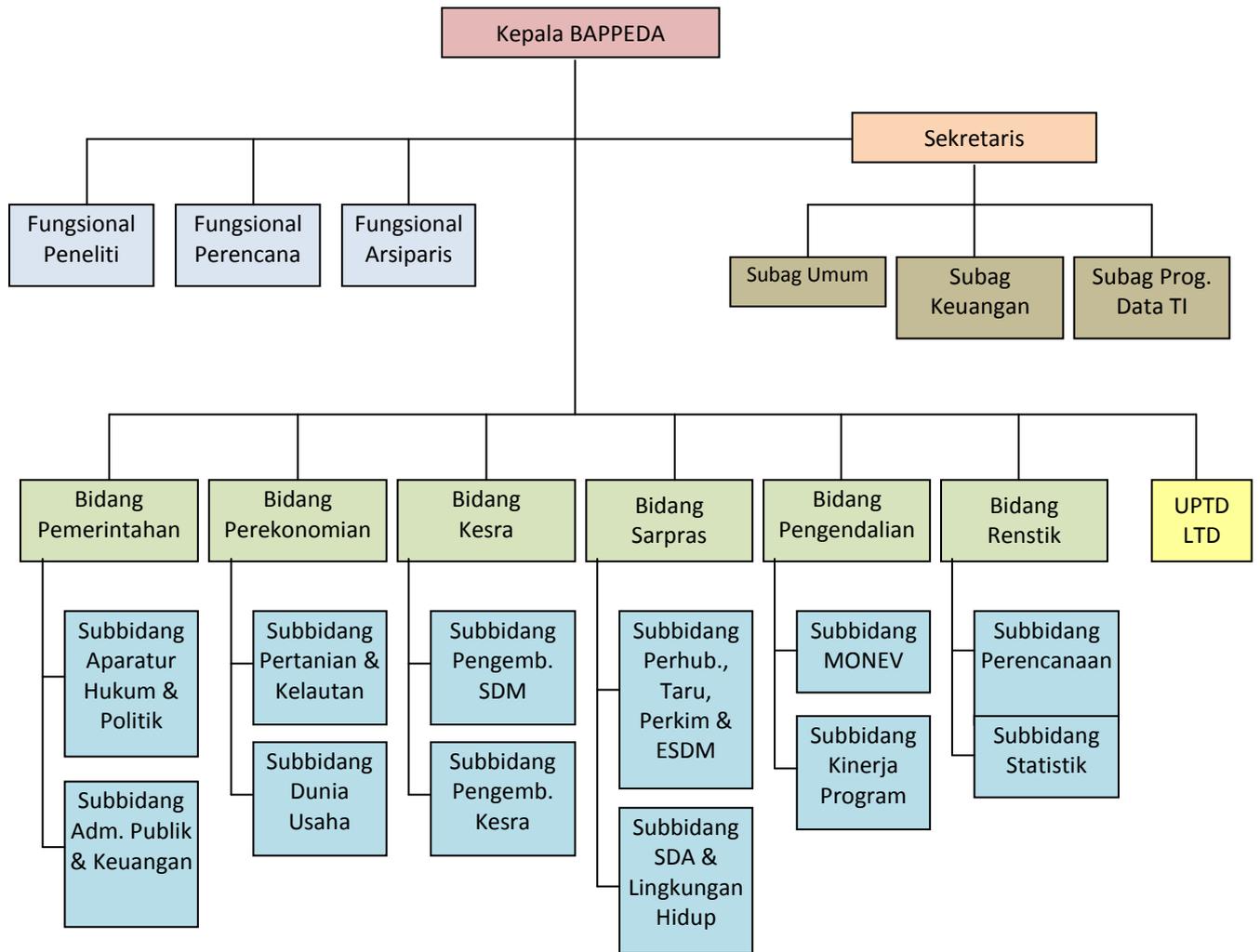
BAPPEDA DIY merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, sebagai unsur perencana pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengampu dua urusan yaitu perencanaan pembangunan dan statistik. Dari Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkanlah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang antara lain menyatakan bahwa BAPPEDA DIY terdiri dari unsur:

1. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan serta Sub Bagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
2. Bidang Pemerintahan, yang terdiri dari Sub Bidang Aparatur, Hukum dan Politik dan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan.
3. Bidang Perekonomian, yang terdiri dari Sub Bidang Pertanian dan Kelautan dan Sub Bidang Dunia Usaha.
4. Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat.
5. Bidang Sarana dan Prasarana, yang terdiri dari Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan Energi Sumber daya Mineral dan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.



- 6. Bidang Pengendalian, yang terdiri dari Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Sub Bidang Kinerja Program.
- 7. Bidang Perencanaan dan Statistik, yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Statistik.
- 8. UPT LTD;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

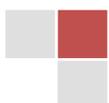
Secara lebih jelasnya struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar II.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah urusan perencanaan pembangunan dan statistik BAPPEDA mempunyai fungsi:

- 1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
- 2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.



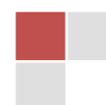
3. Penyelenggaraan pengendalian program pembangunan daerah.
4. Penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi perencanaan.
5. Penyiapan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dan akhir masa jabatan Kepala Daerah serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
6. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat bertugas sebagai pelaksana perencanaan, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, serta pengelolaan data dan sistem informasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program Sekretariat.
2. Penyusunan program Badan.
3. Koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, serta efisiensi dan tatalaksana Badan.
5. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian Badan.
6. Pengelolaan keuangan dan barang Badan.
7. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi.
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan.
9. Fasilitasi pengembangan kerjasama teknis.
10. Evaluasi dan penyusunan laporan Badan.
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan bertugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang aparatur, hukum dan politik serta bidang administrasi publik dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program Bidang Pemerintahan.
2. Penyiapan program di bidang aparatur, hukum dan politik serta bidang administrasi publik dan keuangan.
3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang aparatur, hukum dan politik serta bidang administrasi publik dan keuangan.
4. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang aparatur, hukum dan politik serta bidang administrasi publik dan keuangan.
5. Pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD.
6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pemerintahan.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

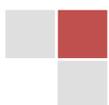


Bidang Perekonomian bertugas sebagai penyusun perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta pariwisata. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program Bidang Perekonomian.
2. Penyiapan program di bidang pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta pariwisata.
3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta pariwisata.
4. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta pariwisata.
5. Pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD.
6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Perekonomian.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, perpustakaan dan arsip, kebudayaan, tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial serta kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Penyiapan program di pendidikan, perpustakaan dan arsip, kebudayaan, tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial serta kesehatan.
3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pendidikan, perpustakaan dan arsip, kebudayaan, tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial serta kesehatan.
4. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, perpustakaan dan arsip, kebudayaan, tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial serta kesehatan.
5. Pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD.
6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Kesejahteraan Rakyat.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi, tata ruang, permukiman, energi sumber daya mineral, sumber daya air dan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

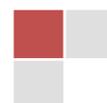
- a. Penyusunan program Bidang Sarana dan Prasarana.
- b. Penyiapan program di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi, tata ruang, permukiman, energi sumber daya mineral, sumber daya air dan lingkungan hidup.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi, tata ruang, permukiman, energi sumber daya mineral, sumber daya air dan lingkungan hidup.
- d. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi, tata ruang, permukiman, energi sumber daya mineral, sumber daya air dan lingkungan hidup.
- e. Pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Sarana dan Prasarana.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian, bertugas melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program Bidang Pengendalian.
- b. Pengumpulan dan penyusunan data perencanaan serta hasil pelaksanaan program pembangunan daerah.
- c. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah.
- d. Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah.
- e. Penyiapan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- f. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program pembangunan daerah.
- g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pengendalian.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Statistik bertugas sebagai penyusun perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan statistik Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program Bidang Perencanaan dan Statistik.
- b. Perumusan program pembangunan daerah.
- c. Pemberian dukungan, pengembangan dan penyelenggaraan statistik daerah.
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Perencanaan dan Statistik.



- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, maka Bappeda DIY mempunyai konsekuensi untuk mengkoordinasikan perencanaan urusan Keistimewaan yang meliputi :

1. Tata cara pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur
2. Kebudayaan
3. Pertanahan
4. Kelembagaan
5. Tata Ruang

B. Sumberdaya BAPPEDA DIY

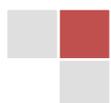
1. Kondisi Kepegawaian

Sampai dengan Mei 2013, jumlah pegawai BAPPEDA DIY tercatat sebanyak 119 orang. Kondisi pegawai berdasarkan posisi jabatan, golongan dan pendidikan secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.1 Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di BAPPEDA DIY Tahun 2013

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
A. Pejabat Struktural			
Kepala (Eselon II/a)	1 orang	-	1 orang
Sekretaris (Eselon III/a)	1 orang	-	1 orang
Kepala Bidang (Eselon III/a)	4 orang	2 orang	6 orang
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	1 orang	2 orang	3 orang
Kepala Sub Bidang (Eselon IV/a)	8 orang	4 orang	12 orang
B. Pejabat Fungsional Tertentu			
Pejabat Fungsional Peneliti	-	1 orang	1 orang
Pejabat Fungsional Perencana	6 orang	3 orang	9 orang
C. Staf Fungsional Umum			
Penata Tk. I (III/d)	5 orang	-	5 orang
Penata (III/c)	7 orang	4 orang	11 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	23 orang	16 orang	39 orang
Penata Muda (III/a)	8 orang	8 orang	16 orang
Pengatur Tk. I (II/d)	1 orang	-	1 orang
Pengatur (II/c)	2 orang	-	2 orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	0 orang
Pengatur Muda (II/a)	4 orang	-	4 orang
Juru (I/c)	1 orang	-	1 orang

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013



Apabila dikelompokkan berdasarkan golongan, maka kondisi kepegawaian pada BAPPEDA DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.2 Kondisi Kepegawaian Pada BAPPEDA DIY Menurut Golongan Tahun 2013

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang		1 orang
Pembina Tk. I (IV/b)	4 orang	1 orang	5 orang
Pembina (IV/a)	3 orang	3 orang	6 orang
Penata Tk. I (III/d)	15 orang	6 orang	21 orang
Penata (III/c)	7 orang	5 orang	12 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	23 orang	16 orang	39 orang
Penata Muda (III/a)	17 orang	9 orang	26 orang
Pengatur Tk. I (II/d)	1 orang		1 orang
Pengatur (II/c)	2 orang		2 orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0 orang		0 orang
Pengatur Muda (II/a)	4 orang		4 orang
Juru (I/c)	1 orang		1 orang

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013

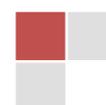
Sedangkan apabila dilihat dari tingkat pendidikan, maka kondisi kepegawaian pada BAPPEDA DIY secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.3 Kondisi Kepegawaian Pada BAPPEDA DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sarjana S2	21 orang	8 orang	29 orang
Sarjana S1	34 orang	20 orang	54 orang
Diploma IV	2 orang		2 orang
Diploma III/SM (DIII/SM)	2 orang	2 orang	4 orang
SLTA	17 orang	9 orang	26 orang
SLTP	2 orang		2 orang
SD	2 orang		2 orang

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi personalia BAPPEDA DIY didominasi oleh kualifikasi pendidikan S1 (54 orang atau 45,38 %), kemudian diikuti oleh pendidikan S2 (29 orang atau 24,37%), dan SLTA (26 orang atau 21,85 %). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi personalia BAPPEDA DIY cukup memadai.



Dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien serta ada kejelasan, kepastian dan pola tindakan yang sistematis dalam setiap pelaksanaan kegiatan, Bappeda DIY telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA DIY Nomor 188/4034, Tanggal 8 Desember 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di BAPPEDA DIY sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Aset berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.4 Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada BAPPEDA DIY Tahun 2013

Jenis Peralatan	Jumlah
Kendaraan roda 4	12 buah
Kendaraan roda 2	17 buah
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.402 buah
Alat Studio dan komunikasi	180 buah
Buku Perpustakaan	3.052 buah

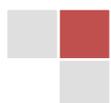
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013

Peralatan komputer sebagian besar telah tersambung dalam jaringan *Local Area Network* (LAN). Disamping itu juga tersedia perangkat GIS (*Geographic Information System*) yang lengkap dengan *digitizer* dan *plotter* dalam satu ruang GIS.

Sarana telekomunikasi, baik telepon dan *faximile* tersedia memadai, demikian pula dengan akses internet.

Saat ini BAPPEDA DIY juga telah memiliki 1 buah *server* yang memuat *database website* BAPPEDA DIY, serta 4 buah *server* lainnya yang memuat *database* Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah, serta Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR). Keempat aplikasi Sistem Informasi tersebut dapat diakses melalui website BAPPEDA DIY.

Sedangkan transportasi berupa kendaraan dinas untuk operasional organisasi cukup memadai dari segi kuantitas dan kualitas, yang didukung penambahan dan/atau peremajaan kendaraan menggantikan kendaraan dinas yang sudah tua secara periodik.



C. Kinerja Pelayanan BAPPEDA DIY

BAPPEDA DIY melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam urusan perencanaan pembangunan daerah berupa :

1. Perencanaan jangka panjang (RPJPD) memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah kurun waktu 2005 – 2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 ;
2. Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2009-2013 pada tahun 2009 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009;
3. Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2012- 2017 pada tahun 2012 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012. RPJMD merupakan jabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan program-program kewilayahan yang disertai dengan rencana- rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

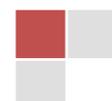
Adapun capaian kinerja BAPPEDA DIY terhadap renstra sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA DIY Tahun 2009-2013

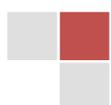
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase keselarasan RKPD terhadap RKP serta dokumen perencanaan lainnya				65	65	68	72	75	65	65	72	98,71	-	100	100	105,88	137,10	-
2	Persentase data yang dapat disiapkan secara lengkap				85	87	92	95	95	85	87	90	90,56	-	100	100	97,8	95,33	-
3	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD				100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
4	Persentase deviasi antara realisasi dengan perencanaan				2,5	2,25	2	1,75	1,5	2,5	2,25	2	3,64	-	100	100	100	98,11	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013

Berdasarkan tabel tersebut, dapat terlihat dari 4 target kinerja di dalam Renstra BAPPEDA DIY, 2 target telah tercapai baik padatahun ke 1 sampai dengan tahun ke 4



dan ada 1 target yang tidak tercapai pada tahun ke 3 dan tahun ke 4 yaitu pada indikator Persentase data yang dapat disiapkan secara lengkap. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa elemen data yang memang tidak tersedia di SKPD karena elemen data yang ada mengacu pada elemen data SIPD di Pusat yang diterapkan secara nasional dan yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi di daerah (DIY) sehingga perlu adanya koordinasi dan pencermatan elemen data untuk disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah (DIY), sedangkan indikator Persentase deviasi antara realisasi dengan perencanaan, pada tahun ke 4 juga tidak tercapai bahkan realisasi capaian indikator ini menunjukkan deviasi yang paling besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Besarnya deviasi pada tahun ke 4 ini sangat diwarnai oleh tingkat kesulitan SKPD dalam pelaksanaan program/kegiatan dimana ada beberapa pekerjaan pembebasan lahan dan pekerjaan konstruksi yang tidak dapat diselesaikan sesuai target. Kondisi yang demikian merupakan tantangan kedepan bagi BAPPEDA DIY untuk dapat merumuskan strategi pengendalian yang tepat dalam rangka menurunkan deviasi tersebut.



Tabel II.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA DIY

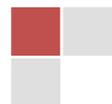
No	URAIAN	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada tahun			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
1.	Belanja Tidak Langsung	4.184.415.000	4.554.560.000	5.241.789.105	5.192.186.674	4.404.183.131	4.432.659.580	4.830.052.587	5.133.119.037
2.	Belanja Langsung	11.095.227.400	9.802.664.910	9.638.618.490	19.390.797.813	9.970.912.335	9.040.486.700	9.111.381.240	16.995.654.707
	- Belanja Pegawai	2.036.835.100	1.763.643.900	1.676.687.000	3.818.207.802	1.900.029.400	1.698.295.650	1.660.432.000	3.518.376.990
	- Belanja Barang dan Jasa	8.042.522.300	7.706.192.610	7.620.005.590	11.945.709.058	7.137.537.785	7.015.503.100	7.136.597.840	10.200.461.237
	- Belanja Modal	1.015.870.000	332.828.400	341.925.900	3.626.880.953	933.345.150	326.687.950	314.351.400	3.276.816.480
	JUMLAH	15.279.642.400	14.357.224.910	14.880.407.595	24.582.984.487	14.375.095.466	13.473.146.280	13.941.433.827	22.128.773.744

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013

Tabel II.7 Lanjutan, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA DIY

No	URAIAN	Ratio Realisasi terhadap anggaran				Rata-rata pertumbuhan	
		2009	2010	2011	2012	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung	105	97,32	92,15	98,86	7,66	5,30
2.	Belanja Langsung	89,9	92,22	94,53	87,65	29,28	25,99
	- Belanja Pegawai	93,3	96,29	99,03	92,15	36,46	33,02
	- Belanja Barang dan Jasa	88,7	91,04	93,66	85,39	17,16	14,32
	- Belanja Modal	91,9	98,16	91,94	90,35	298,74	291,21

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013



Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dari Tahun 2009-2012 menunjukkan beberapa perubahan fluktuatif terutama didalam realisasi keuangan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa realisasi paling tinggi pada Tahun 2012 pada komponen belanja langsung yang dalam hal ini secara umum merupakan gaji pegawai yang dibayarkan setiap bulannya dalam kurun waktu 1 tahun. Fluktuasi target dan capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena terjadi ketidakefektifan didalam realisasi keuangan yang disebabkan karena masih terdapatnya efisiensi anggaran akibat dari tidak terlaksananya sebagian sub kegiatan, terdapat sisa lelang dari komponen pihak ke-3 akibat penawaran yang lebih rendah dari pagu awal, serta penyesuaian dengan Standar Harga Barang dan Jasa maupun Analisis Standar Belanja. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi optimasi pelaksanaan anggaran dan belanja.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA DIY

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BAPPEDA DIY dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan untuk menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah adalah :

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif;
2. Keterbatasan sumberdaya dalam perencanaan maupun pengendalian pembangunan;
3. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
4. Perubahan peraturan perundangan;
5. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi antar SKPD;
6. Perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara legislatif dan eksekutif;
7. Kebutuhan perencanaan dan implementasi pembangunan yang komprehensif dan saling terintegrasi;
8. Peningkatan supremasi hukum.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi BAPPEDA DIY dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain :

1. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan negara kepada pemerintah daerah yang bersifat istimewa. Dengan adanya tambahan kewenangan DIY dalam hal urusan keistimewaan tersebut maka BAPPEDA DIY dapat merencanakan secara lebih leluasa pada perumusan kebijakan pada lima urusan kewenangan keistimewaan yaitu : Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan, Tata Ruang dan Kebudayaan;

2. Terbitnya Permendagri 54 Tahun 2010 memungkinkan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian Kabupaten Kota dengan Provinsi;
3. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan;
4. Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan Dukungan database perencanaan dari SKPD lain;
5. Terbukanya kesempatan pengembangan SDM melalui pendidikan dan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu dari Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya;
6. Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang kegiatan perencanaan dan pengendalian;
7. Terdapatnya kebijakan penilaian kinerja instansi yang memasukkan unsur perencanaan dan pengendalian;
8. Perkembangan teknologi.

BAB III

Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Di dalam perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan ketugasan BAPPEDA DIY yang dalam hal ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA DIY. Konteks perumusan isu strategis SKPD BAPPEDA DIY akan meliputi beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Kabupaten/Kota, Telaah terhadap dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sampai dengan tujuan akhir didalam konteks laporan adalah melakukan Penentuan Isu-isu Strategis BAPPEDA DIY.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda DIY

Secara ringkas dapat diuraikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BAPPEDA DIY dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan;
2. Belum optimalnya memberdayakan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Belum optimalnya kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan;
4. Belum meratanya kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia perencana;
5. Masih adanya perbedaan antara data Sektoral dan data dari BPS;
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat;
7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan sebagai evaluasi dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
8. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan system monitoring dan evaluasi (monev).

B. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil Gubernur ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, Visi Pembangunan DIY yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2012-2017), yaitu:

“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”

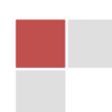
Terhadap Visi Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut di atas, maka BAPPEDA DIY sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian, berkewajiban mendorong, mengarahkan dan sekaligus mengawal pelaksanaan pembangunan daerah guna pencapaian kondisi yang diinginkan, yaitu:

Tabel III.1 Kaitan Visi, Misi KDH dan Wakil KDH dengan Tugas Fungsi Pelayanan BAPPEDA

No	Kondisi 5 Tahun Kedepan	Peran Bappeda
1	2	3
1.	Lebih berkarakter , dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiaikan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya.	BAPPEDA DIY melalui semua bidang diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pencapaian kondisi “lebih berkarakter” dan “Berbudaya” melalui pengarusutamaan kebudayaan dalam perumusan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan di segala bidang.
2.	Yang berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal mampu menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkokoh budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (<i>local wisdom</i>) dan keunggulan lokal (<i>local genius</i>). Berbudaya juga dimaknai sebagai upaya pemberadaban melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk	

No	Kondisi 5 Tahun Kedepan	Peran Bappeda
1	2	3
	menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesa budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya lokal.	
3.	Yang maju dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata. Peningkatan kualitas kehidupan adalah kondisi dimana terjadi peningkatan mutu kehidupan masyarakat dari berbagai aspek atau ukuran dibanding daerah lain. Lebih merata dimaknai sebagai menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar wilayah. Kemandirian dan kemajuan masyarakat tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.	BAPPEDA DIY melalui semua bidang diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pencapaian kondisi “lebih maju” dan “merata” melalui penciptaan kondisi lingkungan yang berkualitas merata dan terjangkau.
4.	Yang mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya(self-help), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat Mandiri juga ditandai dengan civil society yang kuat, agar mampu menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. Civil society yang mampu mencegah otoritas negara tidak memasuki domain society secara berlebihan, dan yang mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan komplemen dari negara.	BAPPEDA DIY melalui semua bidang diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan pencapaian kondisi “lebih mandiri” melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah dan terbentuknya masyarakat madani.
5.	Yang sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.	BAPPEDA DIY melalui semua Bidang dengan didukung stakeholder lainnya diharapkan mampu menjadi katalisator dalam mewujudkan pencapaian kondisi lebih “sejahtera” menuju tata kehidupan yang lebih beradab
6.	Menyongsong Peradaban Baru dimaknai sebagai awal dimulainya harmonisasi hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta adiluhung.	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013



Perwujudan Visi DIY tersebut diatas dilakukan melalui Misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun empat misi pembangunan DIY adalah sebagai berikut :

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
2. Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Penjabaran makna Misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi kesatu, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.

Misi kedua, dimaknai memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan.

Misi ketiga, dimaknai untuk mendorong pemerintah daerah ke arah katalisator dan mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri.

Misi keempat, dimaknai upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang serta upaya dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Terhadap keempat Misi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut di atas, maka BAPPEDA DIY sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian, berperan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif melalui:

- mengoptimalkan sinergitas perencanaan pembangunan dan meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah,
- meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan
- menyediakan data yang aktual dan valid sebagai bahan perencanaan dan meningkatkan informasi yang dapat diakses publik.

Tabel III.2 Misi, Tujuan dan Sasaran RPJM Terkait dengan Pelayanan BAPPEDA

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 3 : Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien	Mengoptimalkan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah	Persentase kesesuaian program/kegiatan di wilayah DIY dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
yang baik.	dan efektif.		
		Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Persentase deviasi antara perencanaan dengan realisasi
		Menyediakan data yang aktual dan valid sebagai bahan perencanaan	Persentase ketersediaan data dasar dalam perencanaan pembangunan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA DIY

Terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

BAPPEDA DIY. Sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan yang meliputi Sumber Daya

Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa masalah yang dihadapi harus segera diatasi agar potensi – potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik, diantaranya dengan memberdayakan sumber daya manusia di BAPPEDA DIY yang cukup memadai sebagaimana tersebut dalam bab II.

Potensi SDM yang berpendidikan tinggi, diharapkan dapat melaksanakan tugas – tugas BAPPEDA DIY secara lebih baik. Disamping potensi tersebut, BAPPEDA DIY juga dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu jumlah SDM yang terbatas dibandingkan dengan beban tugas yang besar dimana SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga belum optimal.

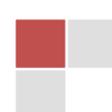
Selain permasalahan sumber daya manusia, BAPPEDA DIY dihadapkan pada beberapa permasalahan lainnya antara lain masalah kelembagaan (beban kerja yang berat), belum optimalnya sistem pengelolaan database, belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan serta belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang.

Selain faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA DIY.

Faktor – faktor dimaksud antara lain :

1. Globalisasi

Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia, seperti arus pandangan/ nilai-nilai (*value*) tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan Teknologi Informasi.



2. Peraturan Perundang - Undangan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan atau acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres, Kepres, Permen, Kepmen terkait, Perda dan peraturan – peraturan lainnya. Adanya perubahan landasan atau acuan hukum yang mendasari, mengakibatkan peraturan perundang–undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

3. Terbatasnya SDM di bidang perencanaan pembangunan di lingkungan Pemda DIY yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Selain itu, kualitas SDM perencana yang belum merata di SKPD–SKPD mengakibatkan beban tugas perencanaan menjadi *overload* (terlalu banyak beban pekerjaan) meskipun dari sisi kualitas sumberdaya manusia yang tersedia memang sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas – tugas secara prosedural. Untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas di SKPD, diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas secara memadai jumlahnya. Kebijakan moratorium PNS yang telah dua tahun ini menghentikan penerimaan PNS menjadi salah satu alasan semakin berkurangnya kuantitas SDM disamping alasan alamiah yaitu berkurangnya PNS karena memasuki usia pensiun.

2. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BAPPEDA DIY

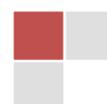
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Ditinjau dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada BAPPEDA DIY sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BAPPEDA Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Visi : “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”				
1.	Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;	Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung peningkatan kinerja BAPPEDA dalam	Belum adanya kesepahaman diantara para pengampu perencanaan dan pengendalian terkait nilai-	• Paradigma Pembangunan Nasional adalah pembangunan berbasis kemanusiaan (<i>people centered development</i>).

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		merencanakan pembangunan berbasis nilai-nilai kemanusiaan, disebabkan belum optimalnya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.	nilai kemanusiaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal • Kualitas SDM memadai
2.	Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif	Belum optimalnya hasil perencanaan bidang perekonomian yang berdimensi kerakyatan, berdaya saing, inovatif, dan kreatif dalam rangka menguatkan perekonomian daerah	Belum optimalnya perencanaan perekonomian yang didukung dengan data kewilayahan dan sektoral yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kajian perencanaan yang dapat digunakan sebagai <i>based line</i> dalam perencanaan bidang ekonomi. • Kualitas SDM memadai
3.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;	Belum optimalnya perencanaan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya perencanaan yang berprinsip pada transformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Telah tersedia instrumen untuk menilai kinerja program/ kegiatan yang implementatif • Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal • Kualitas SDM memadai
4.	Memantapkan prasarana dan sarana daerah.	Belum optimalnya perencanaan dalam rangka memantapkan prasarana dan sarana daerah	Belum optimalnya sinergitas perencanaan kewilayahan dan sektoral yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal • Kualitas SDM memadai

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013



C. Telaahan Renstra Bappenas Dan Renstra Bappeda Kabupaten/Kota

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional periode 2010 – 2014 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada BAPPEDA DIY sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.4 Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Menengah Renstra BAPPENAS	Permasalahan Pelayanan Pelayanan BAPPEDA DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung peningkatan kinerja Bappeda. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan data statistik dari BPS Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan sinergi dan sinkronisasi antar daerah (antar Provinsi, Kab/Kota) dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (i.e <i>Trilateral Desk</i>) Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal. Kualitas SDM yang memadai
2.	Tingkat kepercayaan pemangku	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya dalam 	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya kesenjangan 	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan sinergi dan

Renstra Bappeda DIY |

No	Sasaran Menengah Renstra BAPPENAS	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
	kepentingan (<i>stakeholders</i>) terhadap RPJMN 2010-2014	<p>memberdayakan masyarakat pada proses perencanaan pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan sebagai evaluasi dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. 	<p>pemahaman antar para pemangku kepentingan terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan</p>	<p>sinkronisasi antar daerah (antar Provinsi, Kab/Kota) dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (i.e <i>Trilateral Desk</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (i.e Musrenbang) • Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal. • Kualitas SDM yang memadai
3.	Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terhadap RKP	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya dalam memberdayakan masyarakat pada proses perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya implementasi kegiatan dan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan karena kepentingan masyarakat yang beragam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (i.e Musrenbang) • Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal. • Tingkat kesadaran publik yang cukup tinggi • Kualitas SDM yang memadai
4.	Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada dokumen perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan



No	Sasaran Menengah Renstra BAPPENAS	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
	dengan kebijakan pembangunan nasional,	dan kewilayahan	basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan	pembangunan nasional • Kualitas SDM yang memadai

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013

Permasalahan pelayanan BAPPEDA DIY Berdasarkan sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten/Kota di DIY beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.5 Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY Berdasarkan Sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten/Kota di DIY Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
A.	Bappeda Kota Yogyakarta			
1.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan internal Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan • Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi (monev). 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antara Bappeda Kota Yogyakarta dan BAPPEDA DIY • Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal • Kualitas SDM yang memadai
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi (monev). 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergi siklus kerja Bidang-Perencanaan dan Pengendalian • Belum 	<ul style="list-style-type: none"> • Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal • Kualitas SDM yang memadai

No	Sasaran Menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
			optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan	
B.	Bappeda Kabupaten Bantul			
	Tujuan: Terwujudnya sistem kerja yang profesional			
1.	Terciptanya sistem kerja yang baik	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan • Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi (monev). 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sumberdaya pengumpul data • Belum optimalnya sinergi siklus kerja Bidang- bidang Perencanaan dan Pengendalian • Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal • Kualitas SDM yang memadai
	Tujuan: Tersedianya data/informasi berbasis teknologi informasi			
1.	Tersedianya data/informasi yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan data statistik dari BPS • Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat 	<ul style="list-style-type: none"> • perbedaan antara data sektoral dan data statistik • Kapasitas kelembagaan urusan statistik perlu diperkuat 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kegiatan Pengembangan Statistik Daerah • Telah terjalin Kerjasama dengan BPS
	Tujuan: Terwujudnya rencana pembangunan daerah yang			



No	Sasaran Menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan Pelayanan BAPPEDA DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
	berkualitas.			
2.	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya dalam memberdayakan partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan; • Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung peningkatan kinerja Bappeda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergi siklus kerja Bidang-bidang Perencanaan dan Pengendalian • Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif (ie. Trilateral Desk, dan pelibatan masyarakat dalam Musrenbang) • Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal • Kualitas SDM yang memadai
	Tujuan: Terwujudnya evaluasi, analisis dan pelaporan yang sistematis, dan benar			
1.	Terlaksananya evaluasi, analisis dan pelaporan yang sistematis, dan benar.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan sebagai evaluasi dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. • Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi (monev). 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergi siklus kerja Bidang-bidang Perencanaan dan Pengendalian • Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pengendalian dan pelaporan telah berjalan dengan baik. • Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal • Kualitas SDM yang memadai
	Tujuan: Terwujudnya koordinasi yang			

No	Sasaran Menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
	efektif			
1.	Tercapainya koordinasi antar- <i>stake holder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan • Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi (monev). 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergi siklus kerja Bidang-bidang Perencanaan dan Pengendalian • Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif (ie. Trilateral Desk, dan pelibatan masyarakat dalam Musrenbang) • Koordinasi pengendalian dan pelaporan telah berjalan dengan baik • Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal • Kualitas SDM yang memadai
C.	Bappeda Kabupaten Kulonprogo			
	Tujuan: Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan pembangunan			
1.	Meningkatnya dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan • Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi (monev). 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergi siklus kerja Bidang-bidang Perencanaan dan Pengendalian • Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif (ie. Trilateral Desk, dan pelibatan masyarakat dalam Musrenbang) • Koordinasi pengendalian dan pelaporan telah berjalan dengan baik
2.	Meningkatnya dokumen perencanaan dan peraturan perundangan yang disosialisasikan			
3.	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pembangunan daerah			



No	Sasaran Menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
				<ul style="list-style-type: none"> • Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal • Kualitas SDM yang memadai
	Tujuan: Terwujudnya peningkatan ketersediaan data yang valid dan akurat			
1.	Tersedianya data/informasi statistik daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan data statistik dari BPS • Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sumberdaya pengumpul data • Perbedaan antara data sektoral dan data statistik • Kapasitas kelembagaan urusan statistik perlu diperkuat 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kegiatan Pengembangan Statistik Daerah • Telah terjalin Kerjasama dengan BPS
	Tujuan: Terwujudnya peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya			
1.	Meningkatnya kerjasama pembangunan daerah dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergi dan koordinasi kerja Bidang-bidang Perencanaan dan Pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ada kerjasama antara PEMDA DIY dan Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi dalam melakukan pendampingan perencanaan.
	Tujuan: Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang			

No	Sasaran Menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Meningkatnya dokumen rencana tata ruang yang disusun	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan • Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan sebagai evaluasi dokumen-dokumen yang telah ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergi siklus kerja Bidang-bidang Perencanaan dan Pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Dokumen Rencana Tata Ruang yang dapat dijadikan based line perencanaan kajian-kajian lain • Adanya lembaga <i>ad hoc</i> BKPRD • Adanya rrSIPR
2.	Meningkatnya kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual yang disosialisasikan			
3.	Meningkatnya koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang			
	Tujuan: Terwujudnya peningkatan kinerja pelaksanaan fungsirrr dan tugas Bappeda			
1.	Meningkatnya kelancaran pelayanan BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan • Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi (monev) 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergi siklus kerja Bidang-bidang Perencanaan dan Pengendalian • Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan • Pengendalian intern belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif • Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal • Kualitas SDM yang memadai • Aplikasi / Sistem informasi yang mendukung perencanaan dan pengendalian
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana BAPPEDA dalam kondisi baik			
3.	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur			
4.	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
5.	Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan BAPPEDA			
D.	Bappeda Kabupaten Gunungkidul			
	Tujuan: Mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional dalam perencanaan			



No	Sasaran Menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
	pembangunan daerah			
1.	Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan profesional dalam perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya SDM berkualitas dan profesional di bidang perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah terdapat instrument penilaian kinerja PNS • Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dengan pendidikan – pelatihan PNS • Dukungan sarana dan prasarana yang memadai
	Tujuan : Mewujudkan koordinasi yang selaras,serasi, dan seimbang dalam rangka pembangunan daerah			
1.	Terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, serta kesepahaman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses pembangunan sektoral dan kewilayahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan sinergi dan sinkronisasi antar daerah (antar Provinsi, Kab/ Kota) dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (i.e Trilateral Desk)
2.	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan 		<ul style="list-style-type: none"> • Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal.
3.	Terwujudnya penataan ruang daerah yang terpadu dan terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan data statistik 		<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas SDM yang memadai
4.	Terwujudnya koordinasi perencanaan yang berbasis sumber daya alam (SDA)	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis 		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Dokumen Rencana Tata

No	Sasaran Menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY dan akurat	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
				Ruang yang dapat dijadikan based line perencanaan kajian-kajian lain <ul style="list-style-type: none"> • Adanya lembaga ad hoc BKPRD • Adanya SIPR
	Tujuan: Mewujudkan manajemen kelembagaan perencanaan pembangunan daerah yang berkapasitas			
1	Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan • Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi (monev). 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergi siklus kerja Bidang-Perencanaan dan Pengendalian • Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif (i.e. Trilateral Desk, dan pelibatan masyarakat dalam Musrenbang) • Optimalisasi ketersediaan aplikasi/ sistem informasi yang mendukung kegiatan perencanaan dan pengendalian. • Koordinasi pengendalian dan pelaporan telah berjalan dengan baik • Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal • Kualitas SDM yang memadai
2	Terwujudnya fungsi perencanaan pembangunan daerah yang memadai			



No	Sasaran Menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
	Tujuan: Mewujudkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan			
1	Meningkatnya peran monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses pembangunan sektoral dan kewilayahan • Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi (monev). 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antar bidang • Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif (Trilateral Desk, dan pelibatan masyarakat dalam Musrenbang) • Koordinasi pengendalian dan pelaporan telah berjalan dengan baik • Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal • Kualitas SDM yang memadai
2	Tersedianya umpan balik proses perencanaan pembangunan daerah			
	Tujuan: Mewujudkan basis data yang <i>up to date</i> untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas			
1.	Terwujudnya basis data dan statistik perencanaan pembangunan yang <i>up to date</i> , tepat dan akurat	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan data statistik dari BPS • Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sumberdaya pengumpul data • perbedaan antara data sektoral dan data statistik • Kapasitas kelembagaan urusan statistik perlu diperkuat 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kegiatan Pengembangan Statistik Daerah • Telah terjalin Kerjasama dengan BPS

No	Sasaran Menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
	Mewujudkan penelitian dan pengembangan untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah			
1.	Terwujudnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antar bidang • Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan • Belum optimalnya penggunaan hasil riset untuk mendukung pelaksanaan perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ada kerjasama antara PEMDA DIY dan Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi dalam melakukan pendampingan perencanaan. • Keberadaan Dewan Riset Daerah di Pemda DIY dapat menjadikan riset sebagai pendorong perencanaan
E.	Bappeda Kabupaten Sleman			
	Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan			
1.	Tersedianya dokumen perencanaan yang komprehensif dan implementatif	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antar bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif (ie. Trilateral Desk, dan pelibatan masyarakat dalam Musrenbang)
2.	Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi (monev). 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pengendalian dan pelaporan telah berjalan dengan baik



No	Sasaran Menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
				<ul style="list-style-type: none"> • Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal • Kualitas SDM yang memadai
	Tujuan: Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan			
1.	Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan data statistik dari BPS • Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas kelembagaan urusan statistik belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kegiatan Pengembangan Statistik Daerah • Telah terjalin Kerjasama dengan BPS
	Tujuan: Meningkatkan manajemen dan sistem informasi pengelolaan data/ informasi yang terpadu			
1.	Meningkatnya efektifitas sistem informasi data yang terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan • Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antar bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif • Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal • Kualitas SDM yang memadai • Aplikasi / Sistem informasi yang mendukung perencanaan dan

No	Sasaran Menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
				pengendalian
	Tujuan: Membina dan mengembangkan SDM perencana yang berkualitas			
1.	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung peningkatan kinerja Bappeda 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya SDM berkualitas dan profesional di bidang perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah terdapat instrument penilaian kinerja PNS Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dengan pendidikan – pelatihan PNS Dukungan sarana dan prasarana yang memadai
	Tujuan: Meningkatkan pelayanan prima			
1.	Meningkatnya fasilitas pendukung perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antar bidang 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan Ketersediaan anggaran Aplikasi / Sistem informasi yang mendukung perencanaan dan pengendalian

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah di DIY baru mengakomodir sebagian kecil pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang pada 20 tahun ke depan, sehingga masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan lahannya.

Rencana Tata Ruang Wilayah DIY ditetapkan dengan Perda Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010, namun belum berdasarkan atas Kajian Lingkungan Hidup



Strategis, namun sudah mengakomodir muatan-muatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pada Tahun 2010 di DIY terjadi erupsi merapi yang mengakibatkan terjadinya perubahan struktur dan pola ruang di DIY. Oleh karena itu Rencana Tata Ruang Wilayah DIY perlu disusun atau ditinjau kembali berdasarkan hasil dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta melihat kondisi eksisting Struktur dan Pola Ruang Wilayah DIY setelah erupsi Merapi, khususnya pada wilayah bagian utara DIY.

Dalam persiapan merumuskan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, BAPPEDA sebagai Sekretariat dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) DIY melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi teknis pendukung dan pemanfaat Rencana Tata Ruang Wilayah terkait dengan penyusunan program dan penyusunan dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Dengan adanya BKPRD permasalahan dan solusi dalam penyelenggaraan penataan ruang dapat dikoordinasikan.

Tabel III.6 Telaahan RTRW dan KLHS Terkait Pelayanan BAPPEDA DIY

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Implikasi RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas fungsi BAPPEDA DIY pada peran koordinasi	1. RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan 2. Kajian lingkungan hidup dalam RTRW baru sampai muatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Bappeda selaku sekretariat BKPRD mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pembentukan BKPRD, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
2.	Implikasi KLHS	Dokumen perencanaan pembangunan belum diikuti dengan KLHS	Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi terbatas	Peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis yang dirumuskan dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah:

1. Sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program;
3. Belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Gambaran pelayanan BAPPEDA DIY;

Berdasarkan tabel sebelumnya, dapat diketahui hampir keseluruhan target di dalam renstra BAPPEDA telah tercapai. Adapun yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa tingkat deviasi antara perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan realisasinya masih cukup besar (3,64%). Angka ini masih lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 1,75%. Hal ini merupakan tantangan kedepan bagi BAPPEDA untuk dapat merumuskan strategi yang tepat dalam rangka menurunkan deviasi tersebut.

2. Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas ;

Terdapat beberapa faktor penghambat didalam pencapaian sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas, antara lain :

- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- Masih adanya kesenjangan pemahaman antar para pemangku kepentingan terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan;
- Ketidakesesuaian perencanaan pembangunan nasional dengan kondisi yang sesungguhnya di daerah.;
- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan.

Selain faktor penghambat terdapat pula faktor pendukung dalam pencapaian sasaran jangka menengah renstra bappenas, yaitu :

- Telah dilakukan sinergi dan sinkronisasi antar daerah (antar Provinsi, Kab/Kota) dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (i.e *Trilateral Desk*);
- Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal;
- Kualitas SDM yang memadai;
- Sudah dilakukan pelibatan stakeholder terkait dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra BAPPEDA DIY, Bappeda Kabupaten/Kota

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BAPPEDA DIY antara lain:

- Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antara Bappeda Kabupaten/Kota dan BAPPEDA DIY;
- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan;
- Belum optimalnya sinergi dan koordinasi Bidang-bidang Perencanaan sebagai pengampu mitra SKPD dan Bidang Pengendalian selaku fungsi monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan;
- Masih adanya perbedaan data dan informasi yang disampaikan antara data sektoral maupun data statistik yang disebabkan oleh masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan urusan statistik;
- Belum optimalnya system pengendalian intern;
- Belum optimalnya pemanfaatan dan penyediaan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan profesional di bidang perencanaan;
- Belum optimalnya penggunaan hasil studi dan riset untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Di sisi lain, terdapat juga faktor pendukung, diantaranya:

- Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal;
- Sudah dilaksanakan kegiatan Pengembangan Statistik Daerah yang salah satunya dilakukan melalui peningkatan kerjasama antara BAPPEDA dengan Badan Pusat Statistik (BPS) didalam penyediaan data dan informasi statistik;
- Pola pikir atau sistem perencanaan pembangunan sudah bersifat komprehensif dan implementatif;
- Penyusunan perencanaan pembangunan sudah mengakomodasi pendekatan terintegrasi dan sudah mengakomodasi konsep *bottom up planning* (partisipatif) yang disusun melalui beberapa mekanisme kegiatan, yaitu Musrenbangda dan Trilateral Desk yang melibatkan peran serta stakeholder terkait dan masyarakat didalam pelaksanaannya;

- Koordinasi didalam kegiatan pengendalian dan pelaporan sudah dilaksanakan;
 - Sudah dilakukan kerjasama antara PEMDA DIY dengan Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi dalam melakukan pendampingan penyusunan poduk perencanaan.
 - Adanya Dokumen Rencana Tata Ruang yang dapat dijadikan *baseline* perencanaan kajian-kajian lain;
 - Sudah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sub bidang sebagai bentuk mekanisme telaah substansi perencanaan tiap tahun dan menjadi dasar didalam merumuskan rencana pembangunan sektoral;
 - Adanya lembaga *ad hoc* BKPRD;
 - Sudah adanya Sistem Informasi Pembangunan yang kedepan akan saling terintegrasi secara *online* dengan Sistem Informasi Penganggaran, Sistem Informasi Penataan Ruang, Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi;
 - Sudah terdapat instrument penilaian kinerja PNS;
 - Sudah dilaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pendidikan dan pelatihan bagi PNS;
 - Sudah dilakukan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas kerja;
 - Sudah disusun Dewan Riset Daerah di DIY yang dapat dijadikan komponen pendukung untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan di DIY.
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan BAPPEDA DIY;
- Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan BAPPEDA DIY
- Karena Belum dilakukan penyusunan KLHS, maka BAPPEDA DIY belum optimal didalam kajian kelayakan lingkungan terhadap program dan kegiatan yang disusun.

BAB IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Pembangunan BAPPEDA DIY

Penetapan visi dan misi menjadi salah satu komponen penting didalam usaha peningkatan kinerja perencanaan pembangunan khususnya pada institusi BAPPEDA DIY. Visi dan misi tersebut kemudian akan diterjemahkan secara lebih konkret didalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan BAPPEDA DIY. Korelasi dan keterkaitan secara linier beberapa substansi tersebut diperlukan dalam kerangka penyelarasan target-target pembangunan.

A. Visi dan Misi

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY sangat relevan dan strategis dalam rangka merealisasikan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu merupakan unsur perencana pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah yang sudah tertuang didalam RPJMD 2012 -2017.

Dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pemerintahan yang mendorong tercapainya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) BAPPEDA DIY sebagai badan yang tugas pokoknya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah dan statistik perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta agar mampu bersaing dibidang perencanaan pembangunan daerah, maka BAPPEDA DIY harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan *input* menjadi tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Selanjutnya, BAPPEDA DIY menetapkan visi sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS"

Makna dari visi di atas adalah produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh BAPPEDA DIY harus dapat diandalkan sebagai alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah melalui upaya yang sinergis, terintegrasi, dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral. Selain menjadi suatu institusi perencanaan yang handal, BAPPEDA DIY harus menjalankan fungsi pengendalian yang kredibel agar perencanaan pembangunan yang sudah disusun dapat diwujudkan sesuai dengan target – target yang sudah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAPPEDA DIY melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan berdasarkan kompetensi, profesionalisme, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Disamping itu, BAPPEDA DIY secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan, pelaksanaan koordinasi, dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Guna mewujudkan visi BAPPEDA DIY 2012-2017 di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab institusi. Dengan misi tersebut diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Selanjutnya misi BAPPEDA DIY dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
3. Meningkatkan kualitas manajemen data.

Misi pertama, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang benar-benar berkualitas serta dapat diimplementasikan oleh SKPD teknis. Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas diperlukan koordinasi, sinergi, dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi dan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Misi kedua, dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, selain koordinasi juga diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan proses pelaksanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan ini dapat diketahui apakah proses pembangunan yang berjalan telah sesuai dengan yang direncanakan dan hasilnya dapat dievaluasi untuk menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan yang akan datang.

Misi ketiga, untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik, diperlukan pengelolaan data yang baik pula dengan memastikan data tersebut valid/akurat, *up to date*, aktual dan tersedia serta mudah diakses. Oleh karenanya kualitas manajemen data sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan maupun hasil perencanaan itu sendiri.

B. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tabel IV.1 Tujuan yang Ditetapkan untuk Mencapai Visi dan Misi

NO	MISI	TUJUAN
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.	Mengoptimalkan sinergitas perencanaan pembangunan dan meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah
2	Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi
3	Meningkatkan kualitas manajemen data	Menyediakan data yang aktual dan valid sebagai bahan perencanaan serta meningkatkan informasi yang dapat diakses masyarakat

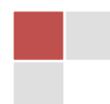
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013

2. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :



Tabel IV.2 Sasaran yang Ditempuh Untuk Mencapai Tujuan

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	MISI PERTAMA Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.		
	TUJUAN : Mengoptimalkan sinergitas perencanaan pembangunan dan meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah	a. Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat b. Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat.	a. Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan b. Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perkonomian, kesejahteraan rakyat dan sarana prasarana
2	MISI KEDUA Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah		
	TUJUAN : Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi	a. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	a. Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Target Sasaran RPJMD
3	MISI KETIGA Meningkatkan kualitas manajemen data		
	TUJUAN : Menyediakan data yang aktual dan valid sebagai bahan perencanaan dan meningkatkan informasi yang dapat diakses masyarakat	a. Data perencanaan yang aktual dan valid b. Meningkatkan aksesibilitas terhadap data	a. Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia b. Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses

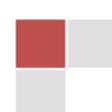
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013

Untuk Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA DIY) Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD BAPPEDA DIY

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET (%)				
				2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Mengoptimalkan sinergitas perencanaan pembangunan dan meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah	Keterpaduan program/ kegiatan pembangunan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	24,16	20,45	17,04	13,94	11,15
		Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat.	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perkonomian, kesejahteraan rakyat dan sarana prasarana	24,16	20,45	17,04	13,94	11,15
Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan-an daerah	Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Target Sasaran RPJMD	74	79	84	91	100
Meningkatkan kualitas manajemen data	Menyediakan data yang aktual dan valid sebagai bahan perencanaan dan Meningkatkan informasi yang dapat diakses masyarakat	Data perencanaan yang aktual dan valid	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	94	96	97	98	100
		Meningkatkan aksesibilitas terhadap data	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	60	70	80	90	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013



Pencapaian indikator pada misi 1 dengan sasaran keterpaduan program/ kegiatan pembangunan meningkat dengan indikator sasaran Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan yang dimulai dari tahun 2013 hingga 2017. Kesenjangan yang diharapkan ditargetkan terus menurun dari 24,16% (2013) menjadi 11,15% (2017). Nominal persentase capaian indikator yang sama juga ditemui pada indikator Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perkonomian, kesejahteraan rakyat, dan sarana prasarana.

Selain itu, untuk indikator Persentase capaian realisasi target sasaran program kegiatan pembangunan pada tahun 2013 diharapkan mencapai 74% dan terus meningkat hingga mencapai target 100% pada tahun 2017. Sedangkan untuk keberhasilan misi peningkatan kualitas manajemen data diharapkan bisa dilihat keberhasilannya melalui indikator Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia, pada tahun 2013 diharapkan sebesar 94% dan terus meningkat hingga sebesar 100% pada tahun akhir perencanaan (2017). Selanjutnya untuk indikator Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses pada tahun 2013 diharapkan mencapai 60% dan target yang harus dicapai pada tahun 2017 sebesar 100%.

C. Strategi Dan Kebijakan

1. Analisis Lingkungan Strategis

Kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi (pemerintah) menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien.

a. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal BAPPEDA DIY yang berhasil diidentifikasi antara lain :

Tabel IV.4 Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL			
No.	KEKUATAN (S)	No.	KELEMAHAN (W)
S1	Struktur Organisasi yang jelas	W1	Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencanaan
S2	Sarana / prasarana Kerja yang memadai	W2	Belum optimalnya system pengelolaan data base perencanaan
S3	Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas	W3	Kurangnya koordinasi internal dan antar bidang
S4	Kualitas SDM yang memadai	W4	Beban kerja yang belum sesuai dengan jumlah SDM

FAKTOR INTERNAL			
No.	KEKUATAN (S)	No.	KELEMAHAN (W)
S5	Motivasi bekerja yang kuat	W5	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
FAKTOR EKSTERNAL			
No.	KEKUATAN (S)	No.	KELEMAHAN (W)
O1	Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan	T1	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif
O2	Dukungan database dari SKPD lain	T2	Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan
O3	Perkembangan teknologi	T3	Sering berubahnya peraturan perundangan
O4	Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan	T4	Kurangnya koordinasi antar SKPD.
O5	Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan system perencanaan	T5	Adanya perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara legislatif dan eksekutif

Sumber : Hasil Analisis Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013

b. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor Kunci Keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis sebelumnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi.

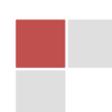
Faktor Kunci Keberhasilan adalah faktor yang memiliki total nilai bobot (TNB) terbesar diantara faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai. Faktor Kunci Keberhasilan juga disebut sebagai kekuatan kunci.

Untuk menilai tingkat urgensi tiap faktor maka digunakan metode komparasi. Metode komparasi yaitu suatu metode untuk menentukan urgen atau tingkat kepentingan satu faktor dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya, guna menentukan faktor mana yang lebih urgen. Pembobotan dilakukan dengan menggunakan skala *Likert*. Adapun hasil penilaian terhadap tingkat urgensi faktor disajikan dalam matriks seperti dalam lampiran.

2. Perumusan dan Penetapan Strategi

a. Perumusan Strategi

Teknik menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT. Matriks SWOT dapat



digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi. Beberapa ahli menganggap, ada 4 (empat) strategi utama yang dapat dirumuskan dalam empat kuadran SWOT yakni :

- **Strategi ekspansi** dirumuskan pada kuadran I.

Dalam kuadran I ini dapat diinteraksikan, dipadukan kekuatan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi SO ke arah ekspansi atau pengembangan, pertumbuhan, perluasan dalam bidang tertentu, dalam mencapai tujuan atau peluang-peluang yang menjanjikan.

- **Strategi diversifikasi** dirumuskan pada kuadran II.

Dalam kuadran II ini dapat diinteraksikan kekuatan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi ST untuk melakukan mobilisasi kekuatan kunci, dalam menciptakan diversifikasi, inovasi, pembaharuan, modifikasi di bidang tertentu dalam upaya mencegah ancaman kunci.

- **Strategi stabilitas / rasionalisasi** dirumuskan pada kuadran III

Dalam kuadran III ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi WO untuk menciptakan stabilitas atau rasionalisasi dalam bidang tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- **Strategi defensif / survival** dapat dirumuskan pada kuadran IV.

Dalam kuadran IV ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi WT yang dapat menciptakan suatu keadaan yang defensif atau survival, efisiensi yang menyeluruh atau pengurangan kegiatan operasional agar dapat bertahan atau keadaan tidak semakin terpuruk akibat desakan yang kuat dari ancaman kunci

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan seperti dalam diagram Formulasi strategi SWOT berikut :

Tabel IV.5 Formulasi Strategi SWOT

	Strength (S)	Weakness (W)
IFAS	Struktur organisasi yang jelas	Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencana
	Sarana/prasarana kerja yang memadai	Belum optimalnya sistem pengelolaan database perencanaan
EFAS	Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Kurangnya koordinasi internal dan antar bidang
	Kualitas SDM yang memadai	Beban kerja yang belum sesuai

	Motivasi bekerja yang kuat	dengan jumlah SDM Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Opportunities (O)	S-O	W-O
Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas fungsi	Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM perencana melalui diklat
Dukungan database dari SKPD lain	Mengintegrasikan data dalam bentuk satu data pembangunan	Memperkuat sistem informasi database perencanaan terpadu
Perkembangan teknologi	Optimalisasi teknologi untuk kelancaran tugas fungsi	Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi jogjaplan
Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan	Meningkatkan kerjasama dalam perencanaan pembangunan	Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain
Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan	Mengintegrasikan monitoring dan evaluasi dalam sistem perencanaan
Threats (T)	S-T	W-T
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif Kurangnya koordinasi antar SKPD	Sosialisasi sistem perencanaan pembangunan kepada masyarakat	Meningkatkan pemahaman perencanaan bagi internal Bappeda maupun masyarakat
Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung koordinasi antar SKPD Meningkatkan kualitas perencanaan sesuai tuntutan dan aspirasi masyarakat	Meningkatkan sistem pengelolaan database perencanaan melalui koordinasi antar SKPD Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan antar bidang untuk menjawab tuntutan dan aspirasi masyarakat
Sering berubahnya peraturan	Memperbaharui wawasan SDM tentang peraturan	Meningkatkan efisiensi kerja dan wawasan tentang peraturan



perundangan	perundangan	perundangan
Adanya perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara legislatif dan eksekutif	Meningkatkan koordinasi dengan legislatif	Merumuskan rekomendasi dan penyamaan persepsi mekanisme perencanaan termasuk monitoring dan evaluasi dengan legislatif

Sumber : Hasil Analisis Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013

b. Penetapan Strategi dan Kebijakan

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

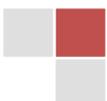
Tabel IV.6 Strategi yang Ditetapkan Dalam Rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran Melalui Kebijakan dan Program

No	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
		STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
	MISI PERTAMA		
1	Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat Keterpaduan program kegiatan pembangunan meningkat	a. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan melalui trilateral desk b. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi jogjaplan	a. Pengarusutamaan sistem perencanaan terpadu
	MISI KEDUA		

No	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
		STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
2	a. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	a. Merumuskan rekomendasi monitoring evaluasi dan penyamaan persepsi mekanisme perencanaan dengan legislatif b. Mengintegrasikan monitoring dan evaluasi sistem perencanaan	a. Meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pengendalian terpadu.
	MISI KETIGA		
3	a. Data perencanaan yang aktual dan valid b. Meningkatkan aksesibilitas terhadap data	a. Mengintegrasikan data dalam bentuk satu data pembangunan b. Memperkuat sistem informasi data terpadu	a. Membangun sistem satu data pembangunan

Sumber : Hasil Analisis Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013





BAB V

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

Rencana Program/Kegiatan, serta Indikator Kinerja dan Pendanaan yang disusun didalam Rencana Strategis BAPPEDA DIY bersifat indikatif. Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigma pembangunan 5 (lima) tahunan tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan beberapa iterasi dan penyesuaian didalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaan khususnya didalam proses perencanaan pembangunan di DIY yang dalam hal ini adalah BAPPEDA DIY.

A. Rencana Program/Kegiatan

Rencana program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada BAPPEDA DIY disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi BAPPEDA DIY yang berfungsi sebagai institusi perencanaan, statistik, serta pengendalian.

Adapun rencana program/kegiatan pada BAPPEDA DIY adalah, sebagai berikut:

Tabel 0.1 Program dan Kegiatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
11	Penyediaan Makanan dan Minuman
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
B.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4	Pengadaan Mebeleur
5	DED Pembangunan Gedung Kantor
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal
2	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat

3	Workshop Jabatan Fungsional Tertentu
4	Fasilitasi Kegiatan Jabatan Fungsional Tertentu
D.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD Serta Pengembangan Data Dan Informasi
4	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
E.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Penyusunan Rancangan RPJMD
2	Penyusunan Rancangan RKPD
3	Penyusunan KUA DAN PPAS
4	Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan
5	Sinkronisasi Dan Koordinasi Program Pembangunan
6	Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan
7	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Review RPJMD DIY
9	Review Proses Perencanaan Pembangunan
10	Evaluasi Musrenbang Regional Jawa -Bali
F.	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
1	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik
2	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub bidang Aparatur, Hukum dan Politik
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan
5	Fasilitasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia dan Laboratorium Ketahanan Nasional (LABKURTANNAS) di Provinsi DIY
6	Perencanaan Penanganan Bencana
7	Fasilitasi Pemberantasan Korupsi
8	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah
G.	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
1	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan
2	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha
3	Koordinasi Sub Bidang Pertanian dan Kelautan

4	Koordinasi Sub Bidang Dunia Usaha
5	Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)
H.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
1	Koordinasi Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
2	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM
3	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Pengembangan SDM
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Pengembangan Kesra
6	Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGs
7	Orientasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi SKPD
I	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana
1	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM
2	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, dan ESDM
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5	Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Air
6	Pembinaan Penataan Ruang Daerah
7	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)-Loan
8	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)-APBD
J.	Program Pengendalian Pembangunan Daerah
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
2	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
3	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah
4	Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
5	Pengendalian Koordinasi Program Strategis di DIY
6	Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah
7	Penyusunan Dokumen panduan Pelaksanaan APBD
8	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
9	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
10	Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Kepada Kabupaten/Kota dan Masyarakat

11	Monitoring dan Evaluasi Program Pemaangan yang Berkeadilan dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Lingkup Pemda DIY dan Kabupaten/Kota
12	Monitoring dan EvaluasiPengentasan Kemiskinan
13	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan
14	Pengembangan Aplikasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
K.	Program Pengembangan Data/Informasi
1	Pengembangan Website
2	PengembanganSistemInformasiPerencanaan Pembangunan Daerah
3	PengembanganSistemInformasi Meta Data Spasial Daerah
4	PengembanganSistemInformasiPengendalianPelaksanaan Pembangunan Daerah
5	PengembanganSistemInformasiProfil Daerah
6	PengembanganProfilBappeda
7	EksposePerencanaan Pembangunan Daerah
8	PengembanganSistemJaringan Internet
L.	Program Pengembangan Statistik Daerah
1	Pengolahan, Analisis, Monitoring, dan Evaluasi Data Statistik Daerah
2	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Sumber : Hasil Analisis Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013

B. Indikator Kinerja dan Pendanaan

Indikator kinerja dan pendanaan Satuan kerja Perangkat Daerah pada BAPPEDA DIY disusun dengan memperhatikan indikator dan pendanaan yang telah dirumuskan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Daerah Istimewa Yogyakarta, perumusan indikator kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan pada penentuan dan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA DIY yang dalam hal ini meliputi 2 (dua) komponen utama, yaitu :

1. Unsur Perencanaan;
2. Unsur Pengendalian.

Dengan Unsur Data dan Statistik menjadi komponen pendukung dari kedua komponen utama tersebut. Adapun indikator kinerja dan pendanaan pembangunan di DIY adalah, sebagai berikut :

Tabel 0.2 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Tiap Program Prioritas Pembangunan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
				Target	Rp. 000								
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	1.707.608	100%	1.707.608	100%	1.878.300	100%	1.795.000	100%	1.974.500
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	3.120.400	100%	3.120.400	100%	2.682.440	100%	2.950.684	100%	3.245.752
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	93.115	100%	150.000	100%	165.000	100%	181.500	100%	199.650
4.	Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas	100%	100%	161.325	100%	161.325	100%	177.458	100%	195.204	100%	214.724

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
				Target	Rp. 000								
		dan fungsi SKPD											
5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan	28,19%	24,16%	1.193,915	20,45%	2.190.000	17,04%	2.265.000	13,94%	2.440.000	11,15%	2.690.000
6.	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Pemerintahan	1,34%	1,15%	1.206,240	0,97%	1.010.000	0,81%	1.135.000	0,66%	1.260.000	0,53%	1.385.000
7.	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Perekonomian	6,71%	5,75%	848.749	4,87%	935.000	4,06%	985.000	3,32%	1.045.000	2,65%	1.175.000
8.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sosial Budaya	17,45%	14,96%	1.181.841	12,66%	1.365.000	10,55%	1.515.000	8,63%	1.665.000	6,90%	1.815.000

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
				Target	Rp. 000								
9.	Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sarana Prasarana	2,68%	2,30%	1.389.811	1,95%	1.385.000	1,62%	1.535.000	1,33%	1.685.000	1,06%	3.635.000
10.	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	0%	74%	1.439.699	79%	1.655.000	84%	1.875.000	91%	2.090.000	100%	2.300.000
11.	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang dapat Diakses	50%	60%	905.080	70%	570.000	80%	670.000	90%	770.000	100%	870.000
12.	Program Pengembangan Statistik Daerah	Persentase Kelengkapan Data Perencanaan Yang Tersedia	92%	94%	1.425.000	96%	1.475.000	97%	1.525.000	98%	1.575.000	100%	1.625.000

Sumber : RPJMD DIY, Tahun 2012-2017

Tabel 0.3 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Program Keistimewaan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
				Target	Rp. 000								
1.	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Kesenjangan Pencapaian Jangka Menengah Dengan Realisasi Tahunan Urusan Keistimewaan	N/A	13%	4.956.571	13%	5.700.000	12%	4.150.000	12%	4.200.000	11%	4.250.000

Sumber : RPJMD DIY, Tahun 2012-2017

BAB VI

Indikator Kinerja BAPPEDA DIY Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD DIY

Indikator kinerja pada BAPPEDA DIY secara prinsip harus sinergis dengan indikator didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2012-2017. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta saling bersinergis. Lebih lanjut indikator kinerja BAPPEDA DIY harus dapat merepresentasikan upaya didalam peningkatan kinerja perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Indikator Kinerja BAPPEDA DIY didalam renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 0.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000								
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	1.707.608	100%	1.707.608	100%	1.878.300	100%	1.795.000	100%	1.974.500	100%	9.063.016
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	100%	100%	10.500	100%	11.771	100%	12.948	100%	12.373	100%	13.611	100%	61.208

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000								
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100%	100%	490.000	100%	547.070	100%	601.777	100%	575.068	100%	632.574	100%	2.846.488
	3. Pemeliharaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	29 unit	29 unit	7.700	29 unit	13.901	29 unit	15.291	29 unit	14.612	29 unit	16.074	100%	67.578
	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan penatausahaan keuangan	12 bulan	12 bulan	30.900	12 bulan	34.640	12 bulan	38.104	12 bulan	36.413	12 bulan	40.054	12 bulan	180.112
	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya Kebersihan Kantor	100%	100%	65.874	100%	76.118	100%	83.730	100%	80.014	100%	88.015	100%	393.752
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	100%	43.336	100%	53.474	100%	58.821	100%	56.211	100%	61.832	100%	273.673
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Terlaksananya Penggandaan Surat-Surat/Dokumen Lainnya	20 jenis	1 paket	34.352	1 paket	42.375	1 paket	46.613	1 paket	44.544	1 paket	48.999	1 paket	216.883
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23 jenis	1 paket	8.800	1 paket	10.874	1 paket	11.962	1 paket	11.431	1 paket	12.574	1 paket	55.640
	9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Dan Bahan Pembersih	22 jenis	1 paket	11.526	1 paket	14.237	1 paket	15.661	1 paket	14.966	1 paket	16.462	1 paket	72.853
	10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Tersedianya Bahan Bacaan (Surat Kabar) dan Tersedianya	1 paket	1 paket	10.170	1 paket	12.556	1 paket	13.811	1 paket	13.198	1 paket	14.518	1 paket	64.253

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000											
	Perundang-undangan	Buku Peraturan Perundang – Undangan														
	11. Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi	12 bulan	12 bulan	94.950	12 bulan	106.443	12 bulan	117.087	12 bulan	111.891	12 bulan	123.080	12 bulan	553.451	
	12. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keikutsertaan /terlaksananya koordinasi/konsolidasi/konfirmasi/konsultasi ke Pusat dan daerah lainnya	12 bulan	12 bulan	899.500	12 bulan	784.148	12 bulan	862.563	12 bulan	824.279	12 bulan	906.707	12 bulan	4.277.198	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	3.120.400	100%	3.120.400	100%	2.682.440	100%	2.950.684	100%	3.245.752	100%	15.119.676	
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhnya Kendaraan Dinas Operasional	3 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	1 paket	470.000	1 paket	476.297	1 paket	409.447	1 paket	450.392	1 paket	495.431	1 paket	2.301.567	
	3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 paket	1 paket	353.377	1 paket	349.844	1 paket	300.742	1 paket	330.816	1 paket	363.898	1 paket	1.698.676	
	4. Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebeleur kantor	1 paket	1 paket	650.000										650.000	
	5. DED Pembangunan Gedung kantor	Terlaksananya Penyusunan DED Perencanaan Rehab Gedung Radyo Suyoso		1 dokumen	45.818										45.818	
	6. Pemeliharaan	Terlaksananya	2000 m ²	-	-											

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000								
	Rutin/ Berkala Gedung Kantor	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor													
7.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional : 1. Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) 2. Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	29 unit	29 unit	252.805	29 unit	356.694	29 unit	306.630	29 unit	337.293	29 unit	371.023	29 unit	1.624.445
8.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	1 paket	26.400	1 paket	30.737	1 paket	26.423	55 unit	29.065	1 paket	31.972	1 paket	144.597
9.	Pemeliharaan Rutin Berkala/ Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 paket	1 paket	44.000	1 paket	51.228	1 paket	44.038	1 paket	48.442	1 paket	53.286	1 paket	240.995
10.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Terpeliharanya Mebeleur Kantor	1 paket	1 paket	11.000	1 paket	105.516	1 paket	90.706	1 paket	99.777	1 paket	109.754	1 paket	416.753
11.	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor	1 paket	1 paket	1.250.000	1 paket	1.750.084	1 paket	1.504.453	1 paket	1.654.898	1 paket	1.820.388	1 paket	7.979.823
12.	Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 4 (empat)	4 unit	2 unit	17.000										17.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk	100%	100%	93.115	100%	150.000	100%	165.000	100%	181.500	100%	199.650	100%	789.265

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000											
		mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD														
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 paket	1 paket	50.000	1 paket	43.345	1 paket	47.679	1 paket	52.447	1 paket	57.692	1 paket	251.162	
	2. Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	Terlaksananya Pelatihan Outbond Bagi Pegawai BAPPEDA DIY	1 paket	1 paket	20.000	1 paket	34.156	1 paket	37.571	1 paket	41.328	1 paket	45.461	1 paket	178.516	
	3. Workshop Jabatan Fungsional Tertentu	Terlaksananya Workshop Jabatan Fungsional Tertentu		1 kegiatan	23.115										23.115	
	4. Fasilitasi Kegiatan Jabatan Fungsional Tertentu	Terlaksananya penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu dan fasilitasi kegiatan jabatan fungsional tertentu	1 paket	1 paket	23.115	1 paket	72.500	1 paket	79.750	1 paket	87.725	1 paket	96.497	1 paket	336.472	
4.	Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	161.325	100%	161.325	100%	177.458	100%	195.204	100%	214.724	100%	910.036	
	1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1. Tersusunnya dokumen RKT 2. Tersusunnya dokumen penetapan kinerja 3. Tersusunnya LAKIP Bappeda	1 Dok	1 Dok	6.000	1 Dok	7.526	1 Dok	8.279	1 Dok	9.107	1 Dok	10.017	1 Dok	40.929	

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000								
	2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1. Tersusunnya laporan keuangan bulanan 2. Tersusunnya laporan keuangan triwulanan 3. Tersusunnya laporan keuangan semesteran 4. Tersusunnya laporan prognosis enam bulan berikutnya 5. Tersusunnya laporan keuangan tahunan	20 Laporan	20 laporan	50.000	20 laporan	18.977	20 laporan	20.875	20 laporan	22.963	20 laporan	25.259	20 laporan	138.074
	3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1. Tersusunnya RKA 2. Tersusunnya RKA Perubahan 3. Tersusunnya DPA 4. Tersusunnya DPA Perubahan 5. Tersusunnya RENJA 6. Tersusunnya ROPK	6 Dok	1 Dok	87.999	6 Dok	108.830	6 Dok	119.713	6 Dok	131.684	6 Dok	144.852	6 Dok	593.078
	4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA	1 laporan	1 laporan	17.326	1 laporan	25.992	1 laporan	28.591	1 laporan	31.450	1 laporan	34.595	1 laporan	137.954
5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan	28,19%	24,16%	1.193.915	20,45%	2.190.000	17,04%	2.265.000	13,94%	2.440.000	11,15%	2.690.000	11,15%	10.778.915

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000								
	1. Penyusunan Rancangan RPJMD	Dokumen RPJMD	1 Dok												
	2. Penyusunan Rancangan RKPDP	Dokumen RKPDP	1 Dok	1 Dok	472.699	1 Dok	871.058	1 Dok	900.889	1 Dok	970.494	1 Dok	1.069.930	1 Dok	4.285.069
	3. Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS		1 Dok	161.970	1 Dok	268.226	1 Dok	277.411	1 Dok	298.845	1 Dok	329.464	1 Dok	1.335.917
	4. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan	Dokumen KUA PPAS Perubahan		1 Dok	123.209	1 Dok	208.253	1 Dok	215.385	1 Dok	232.026	1 Dok	255.799	1 Dok	1.034.672
	5. Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pembangunan	Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pembangunan	1 Lap	1 Lap	180.050	1 Lap	431.882	1 Lap	446.673	1 Lap	481.184	1 Lap	530.485	1 Lap	2.070.274
	6. Penyusunan Rancangan RKPDP Perubahan	Dokumen RKPDP Perubahan	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	240.607	1 Dok	248.847	1 Dok	268.074	1 Dok	295.540	1 Dok	1.053.068
	7. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Perencanaan Program Pembangunan	1 Sistem			1 Sistem	169.974	1 Sistem	175.795	1 Sistem	189.377	1 Sistem	208.781	1 Sistem	743.928
	8. Review RPJMD DIY	Dokumen Hasil Evaluasi/Konsultasi RPJMD Bupati/Walikota Terpilih	2 Dok	Dokumen	78.302										78.302
		Dokumen KUA & PPAS Tahun 2013 dan Dokumen KUA & PPAS Perubahan Tahun 2012	4 Dok												
	9. Review Proses Perencanaan Pembangunan	Dokumen Hasil Review RPJPD DIY		1 Dok	58.610	1 Dok									
	10. Evaluasi Musrenbang Regional Jawa	Terselenggaranya Evaluasi Musrenbang	1 kali	1 kali	177.685										177.685

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000								
	-Bali	Regional Jawa-Bali													
6.	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Pemerintahan	1,34%	1,15%	1.206.240	0,97%	1.010.000	0,81%	1.135.000	0,66%	1.260.000	0,53%	1.385.000	0,53%	5.996.240
	1. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur, Hukum dan Politik	Dokumen Perencanaan Pembangunan Subbid Aparatur, hukum dan Politik	1 Dok	1 Dok	303.650	1 Dok	299.713	1 Dok	336.807	1 Dok	373.900	1 Dok	410.993	1 Dok	1.725.063
	2. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Subbid Administrasi Publik dan Keuangan	1 Dok	1 Dok	295.880	1 Dok	271.754	1 Dok	305.387	1 Dok	339.020	1 Dok	372.653	1 Dok	1.584.694
	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Aparatur, Hukum dan Politik	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Subbid aparatur, Hukum dan Politik	1 Dok	1 Dok	99.455	1 Dok	103.101	1 Dok	115.861	1 Dok	128.621	1 Dok	141.381	1 Dok	588.419
	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Aparatur, Hukum dan Politik	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Subbid Administrasi Publik dan Keuangan	1 Dok	1 Dok	92.800	1 Dok	129.511	1 Dok	145.539	1 Dok	161.568	1 Dok	177.596	1 Dok	707.014
	5. Fasilitasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia dan Laboratorium Ketahanan Nasional (Labkurtannas) di	Dokumen hasil Fasilitasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia Dan Laboratorium Ketahanan Nasional (labkurtannas) di Provinsi DIY	2 Dok	2 Dok	99.982	2 Dok	78.424	2 Dok	88.130	2 Dok	97.836	2 Dok	107.542	2 Dok	471.914

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000						
	Provinsi DIY														
	6. Perencanaan Penanganan Bencana	Dokumen Perencanaan Penanganan Bencana		1 Dok	98.500	1 Dok									98.500
	7. Fasilitasi Pemberantasan Korupsi	Dokumen hasil Fasilitasi Pemberantasan Korupsi		1 Dok	215.973	1 Dok	69.087	1 Dok	77.637	1 Dok	86.187	1 Dok	94.738	1 Dok	534.622
	8. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pemerintah DIY	Dokumen Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Workshop				1 Dok	58.410	1 Dok	65.639	1 Dok	72.868	1 Dok	80.097	1 Dok	277.014
7.	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Perekonomian	6,71%	5,75%	848.749	4,87%	935.000	4,06%	985.000	3,32%	1.045.000	2,65%	1.175.000	2,65%	4.988.749
	1. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan	Dokumen Perencanaan Subid Pertanian dan Kelautan	1 Dok	1 Dok	290.080	1 Dok	327.686	1 Dok	345.209	1 Dok	366.237	1 Dok	411.797	1 Dok	1.741.009
	2. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha	Dokumen Perencanaan Subid Dunia Usaha	1 Dok	1 Dok	259.930	1 Dok	278.581	1 Dok	293.478	1 Dok	311.355	1 Dok	350.088	1 Dok	1.493.432
	3. Koordinasi Sub Bidang Pertanian dan Kelautan	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Subid Pertanian dan Kelautan	1 Dok	1 Dok	149.970	1 Dok	151.724	1 Dok	159.838	1 Dok	169.574	1 Dok	190.669	1 Dok	821.774
	4. Koordinasi Sub Bidang Dunia	Dokumen Koordinasi dan	1 Dok	1 Dok	148.769	1 Dok	127.385	1 Dok	134.197	1 Dok	142.371	1 Dok	160.082	1 Dok	712.803

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000								
	Usaha	Sinkronisasi Subid Dunia Usaha													
		Terlaksananya Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi DIY Tahun 2011-2015	5 kali												-
	5. Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)	Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)				1 Dok	49.625	1 Dok	52.279	1 Dok	55.464	1 Dok	62.363	1 Dok	219.731
8.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sosial Budaya	17,45%	14,96%	1.181.841	12,66%	1.365.000	10,55%	1.515.000	8,63%	1.665.000	6,90%	1.815.000	6,90%	7.541.841
	1. Koordinasi Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan		1 Dok	188.047	1 Dok	287.630	1 Dok	319.237	1 Dok	350.845	1 Dok	382.453	1 Dok	1.528.212
	2. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang pengembangan SDM	1 Dok	1 Dok	336.934	1 Dok	335.569	1 Dok	372.444	1 Dok	409.320	1 Dok	446.196	1 Dok	1.900.463
	3. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra	1 Dok	1 Dok	322.178	1 Dok	383.504	1 Dok	425.647	1 Dok	467.791	1 Dok	509.934	1 Dok	2.109.055
	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub	Dokumen hasil Koordinasi Sub	1 Dok	1 Dok	129.569	1 Dok	142.578	1 Dok	158.246	1 Dok	173.914	1 Dok	189.582	1 Dok	812.111

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000								
	Bidang Pengembangan SDM	Bidang Pengembangan SDM													
	5. Koordinasi dan Singkronisasi Sub Bidang Pengembangan Kesra	Dokumen Koordinasi Sub Bidang Pengembangan Kesra	1 Dok	1 Dok	98.489	1 Dok	143.814	1 Dok	159.618	1 Dok	175.422	1 Dok	191.226	1 Dok	768.569
	6. Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGs	Dokumen hasil Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGs		1 Dok	88.403	1 Dok	71.905	1 Dok	79.807	1 Dok	87.708	1 Dok	95.610	1 Dok	423.432
	7. Orientasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi SKPD	Terlaksananya Pelatihan / Orientasi PPRG bagi aparat Pemda DIY	3 angk												-
9.	Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sarana Prasarana	2,68%	2,30%	1.389.811	1,95%	1.385.000	1,62%	1.535.000	1,33%	1.685.000	1,06%	3.635.000	1,06%	9.629.811
	1. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, tata ruang, Permukiman dan ESDM	1 Dok	1 Dok	438.057	1 Dok	453.937	1 Dok	503.100	1 Dok	552.263	1 Dok	1.191.380	1 Dok	3.138.738
	2. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan	1 Dok	1 Dok	296.910	1 Dok	340.527	1 Dok	377.407	1 Dok	414.287	1 Dok	893.729	1 Dok	2.322.860

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000								
	Hidup	Hidup													
	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM	Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, dan ESDM	1 Dok	1 Dok	149.740	1 Dok	132.423	1 Dok	146.765	1 Dok	161.107	1 Dok	347.551	1 Dok	937.586
	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1 Dok	1 Dok	100.000	1 Dok	90.807	1 Dok	100.642	1 Dok	110.477	1 Dok	238.328	1 Dok	640.254
	5. Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Air	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi	1 Dok												
	6. Pembinaan Penataan Ruang Daerah	Laporan Hasil Koordinasi BKPRD	4 Lap	4 Lap	148.752	4 Lap	151.345	4 Lap	167.736	4 Lap	184.128	4 Lap	397.213	4 Lap	1.049.174
	7. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)-Loan	Laporan Peningkatan Pegelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan		1 Lap	147.962	1 Lap	147.855	1 Lap	163.868	1 Lap	179.882	1 Lap	388.053	1 Lap	1.027.620
	8. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)-APBD	Laporan Peningkatan Pegelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD		1 Lap	108.390	1 Lap	68.105	1 Lap	75.481	1 Lap	82.857	1 Lap	178.746	1 Lap	513.579

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000								
10.	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Presentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap target sasaran RPJMD	0%	74%	1.439.699	79%	1.655.000	84%	1.875.000	91%	2.090.000	100%	2.300.000	100%	9.359.699
	1. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen LAKIPDA	1 Dok	1 Dok	144.787	1 Dok	136.573	1 Dok	154.728	1 Dok	172.470	1 Dok	189.800	1Dok	803.431
	2. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ	1 Dok	1 Dok	323.645	1 Dok	273.142	1 Dok	309.415	1 Dok	344.935	1 Dok	379.594	1 Dok	1.642.107
	3. Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Program pembangunan Daerah	1 Dok	1 Dok	289.577	1 Dok	196.807	1 Dok	222.969	1 Dok	248.536	1 Dok	273.509	1 Dok	1.241.544
	4. Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan hasil Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dok	1 Dok	75.102	1 Dok	54.447	1 Dok	61.685	1 Dok	68.758	1 Dok	75.667	1 Dok	338.291
	5. Pengendalian dan Koordinasi Program Strategis di DIY	Dokumen Pengendalian dan Koordinasi Program Strategis di DIY	1 Dok	1 Dok	190.643	1 Dok	128.440	1 Dok	145.514	1 Dok	162.199	1 Dok	178.497	1 Dok	811.973
	6. Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok	41.883	1 Dok	68.205	1 Dok	77.271	1 Dok	86.132	1 Dok	94.786	1 Dok	369.744
	7. Penyusunan Dokumen panduan Pelaksanaan APBD	Dokumen Panduan Pelaksanaan APBD	1 Dok		-		-		-		-		-		-

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000								
	8. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota		1 Dok	138.187	1 Dok	113.811	1 Dok	128.940	1 Dok	143.725	1 Dok	158.167	1 Dok	687.673
	9. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dokumen Indikator Kinerja Utama		1 Dok	62.626										64.820
	10. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kepada Kabupaten/Kota dan Masyarakat	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan kepada Kabupaten/Kota dan Masyarakat		1 Dok	124.513	1 Dok	41.678	1 Dok	47.218	1 Dok	52.632	1 Dok	57.921	1 Dok	328.324
	11. Monitoring dan Evaluasi program Pembangunan yang Berkeadilan dan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Lingkup Pemda DIY dan Kabupaten/Kota	Hasil Evaluasi Inpres 3 Tahun 2010 dan TEPPA lingkup Pemda DIY dan Kab/Kota		1 Dok	48.735	1 Dok	46.948	1 Dok	53.230	1 Dok	59.333	1 Dok	65.295	1 Dok	224.842
	12. Monitoring dan Evaluasi pengentasan kemiskinan	Laporan monitoring dan evaluasi pengentasan kemiskinan semester I dan II			-	2 dok	108.020	2 dok	122.379	2 dok	136.411	2 dok	150.118	2 dok	516.928
	13. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan	Laporan pengendalian dan evaluasi RPJMD DIY, RKPD DIY, Renstra SKPD DIY, Renja SKPD DIY, RPJMD			-	6 dok	40.252	6 dok	506.013	6 dok	50.832	6 dok	620.709	6 dok	2.137.398

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000						
		kab/Kota dan RKPD Kab/kota													
	14. Pengembangan Aplikasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah			-	1 Lap	40.252	1 Lap	45.602	1 Lap	50.832	1 Lap	55.939	1 Lap	192.625
11.	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang Dapat Diakses	50%	60%	905.080	70%	570.000	80%	670.000	90%	770.000	100%	870.000	100%	3.785.080
	1. Pengembangan Website	Terpenuhinya Pengelolaan Website Bappeda		1 Sistem	59.134	1 Sistem	39.734	1 Sistem	46.705	1 Sistem	53.676	1 Sistem	60.647	1 Sistem	259.896
	2. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	1 Sistem	1 Sistem	224.580										224.580
	3. Pengembangan Sistem Informasi Meta Data Spasial Daerah	Sistem Informasi Meta Data Spasial Daerah		1 Sistem	70.135										70.135
	4. Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sistem Aplikasi Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan	1 Sistem	1 Sistem	154.071										154.071
	5. Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah	Sistem Informasi Profil Daerah	1 Sistem	1 Sistem	304.004	1 Sistem	183.681								
	6. Satu Data Pembangunan	Satu Data Pembangunan						1 Sistem	215.906	1 Sistem	248.131	1 Sistem	280.356	1 Sistem	1.232.078
	7. Pengembangan Profil Bappeda	Profil Bappeda	1 dok	dok	49.104										49.104
	8. Ekspose Perencanaan	Ekspose Perencanaan		1 Kali	44.052	1 Kali	84.376	1 Kali	99.179	1 Kali	113.982	1 Kali	128.785	1 Kali	470.375

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000								
12.	Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah													
	9. Pengembangan Sistem Jaringan Internet	Sistem Informasi Jaringan Internet			0	1 Sistem	262.208	1 Sistem	308.209	1 Sistem	354.211	1 Sistem	400.212	1 Sistem	1.324.841
	Program Pengembangan Statistik Daerah	Persentase Kelengkapan Data Perencanaan Yang Tersedia	92%	94%	1.425.000	96%	1.475.000	97%	1.525.000	98%	1.575.000	100%	1.625.000	100%	6.200.000
	1. Pengolahan, Analisis, monitoring dan Evaluasi Data Statistik Daerah	Analisis data Statistik	4 Dok	4 Dok	1.117.919	4 Dok	1.157.144	4 Dok	1.196.370	4 Dok	1.235.595	4 Dok	1.274.820	4 Dok	4.863.929
	2. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Dukungan Data perencanaan	2 Data	2 Data	307.081	2 Data	317.856	2 Data	328.630	2 Data	339.405	2 Data	350.180	2 Data	1.336.071

Sumber : Hasil Analisis Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013

Tabel 0.2 Indikator Kinerja SKPD Urusan Keistimewaan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	
1.	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Kesenjangan Pencapaian Jangka Menengah Dengan Realisasi Tahunan Urusan Keistimewaan	N/A	13%	4.956.571	13%	5.700.000	12%	4.150.000	12%	4.200.000	11%	4.250.000	11%	23.256.571

1. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Keistimewaan	Materi Program/ Kegiatan sebagai Bahan Usulan dan Keistimewaan	N/A	1 dok	441.919	1 dok	508.202	1 dok	370.006	1 dok	374464	1 dok	378.922	1 dok	2.073.514
2. Penyusunan Pembangunan Urusan Keistimewaan Bidang Pemerintahan	Perencanaan pembangunan urusan keistimewaan bidang pemerintahan	N/A	1 dok	807.342	1 dok	928.434	1 dok	675.965	1 dok	684110	1 dok	692.254	1 dok	3.788.105
3. Penyusunan Pembangunan Urusan Keistimewaan Bidang Perekonomian	Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Bidang Perekonomian	N/A	1 dok	496.350	1 dok	570.797	1 dok	415.580	1 dok	420587	1 dok	425.594	1 dok	2.328.907
4. Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Bidang Kesra	N/A	1 dok	1.431.916	1 dok	1.646.687	1 dok	1.198.903	1 dok	1213348	1 dok	1.227.793	1 dok	6.718.646
Penyusunan Buku Informasi Pembangunan DIY	Buku Informasi pembangunan (Edisi Bahasa Jawa)	N/A	1 dok	130.671	1 dok	150.271	1 dok	109.408	1 dok	110726	1 dok	112.044	1 dok	613.119
Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Keistimewaan	Laporan pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah dalam rangka Keistimewaan	N/A	1 dok	439.700	1 dok	505.650	1 dok	368.149	1 dok	372584	1 dok	377.020	1 dok	2.063.103
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Bidang Sarana Prasarana	Perencanaan Bidang Sarpras Infrastruktur dan LH Yang mendukung Keistimewaan DIY dan Rencana Aksi	N/A	1 dok	824.612	1 dok	948.294	1 dok	690.425	1 dok	698743	1 dok	707.062	1 dok	3.869.136

Fasilitasi Perencanaan Tata Ruang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Monev pengelolaan penataan ruang	N/A	1 dok	384.061	1 dok	441.666	1 dok	321.564	1 dok	325438	1 dok	329.312	1 dok	1.802.041
--	-------------------------------------	-----	-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	--------	-------	---------	-------	-----------

Sumber : Hasil Analisis Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, Tahun 2013

BAB VII

Penutup

Dari beberapa substansi pembahasan Rencana Strategis BAPPEDA DIY yang telah disusun sebelumnya, maka dapat disusun beberapa kesimpulan dan disusun rekomendasi terhadap hasil capaian kegiatan didalam penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA DIY ke depan sebagai masukan didalam usaha peningkatan kinerja institusi/lembaga BAPPEDA DIY dan peningkatan kualitas kinerja staf/pegawai pada BAPPEDA DIY.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyusunan rencana strategis pada BAPPEDA DIY maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rencana strategis SKPD pada BAPPEDA DIY merupakan produk perencanaan 5 (lima) tahunan yang harus diterjemahkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD BAPPEDA DIY;
2. Rencana strategis SKPD pada BAPPEDA DIY harus berkorelasi dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2012-2017 dan terintegrasi, serta selaras pula dengan produk perencanaan pembangunan lainnya baik dalam perencanaan maupun implementasinya;
3. Didalam Rencana strategis SKPD pada BAPPEDA DIY sudah dirumuskan indikator yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY dengan beberapa kriteria indikator, meliputi :
 - Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan;
 - Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Pemerintahan;
 - Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Perekonomian;
 - Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sosial Budaya;

- Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Wilayah dan Sarana Prasarana;
 - Presentase Capaian Realisasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan;
 - Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang dapat Diakses;
 - Persentase Kelengkapan Data Perencanaan Pembangunan yang Tersedia
4. Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA DIY Tahun 2012 – 2017 merupakan Dokumen perencanaan yang dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA DIY untuk lima tahun ke depan. Di dalam Renstra BAPPEDA DIY ini mencakup mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran yang akan dicapai.
 5. Renstra BAPPEDA DIY sebagai pedoman dalam usaha pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan program diharapkan mampu meningkatkan kinerja BAPPEDA DIY. Untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien diperlukan adanya komitmen dan dukungan dari keseluruhan pimpinan dan staf yang ada.
 6. Renstra BAPPEDA DIY merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mengedepankan transparansi, dan akuntabilitas guna mendukung terwujudnya misi Pemerintah Daerah DIY

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada BAPPEDA DIY dapat direkomendasikan beberapa hal, sebagai berikut :

1. BAPPEDA DIY ke depan perlu mempersiapkan ketersediaan *baseline* data yang terkait didalam merumuskan indikator Rencana Strategis sebagai tahapan iterasi didalam proses perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas perencanaan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Perlu dipersiapkan dan dilakukan *breakdown* indikator Renstra BAPPEDA DIY kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD BAPPEDA DIY tiap kegiatan sebagai bagian didalam mengidentifikasi kontribusi tingkat keberhasilan kegiatan perencanaan tiap bidang, sub bidang, sampai dengan program/kegiatan;
3. Tiap kegiatan ke depan akan dapat diukur tingkat keberhasilannya didalam mencapai target indikator baik indikator yang tertuang didalam Rencana Tahunan (Renja), Rencana Strategis, maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).